



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL PAJAK DAN FAKTOR-FAKTOR  
LAIN TERHADAP KONVERGENSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI  
DAERAH (STUDI KASUS PULAU JAWA DAN BALI)**

**TESIS**

**BOBY WIJONARKO  
0706178895**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI  
KEKHUSUSAN EKONOMI PUBLIK  
DEPOK  
JUNI, 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL PAJAK DAN FAKTOR-FAKTOR  
LAIN TERHADAP KONVERGENSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI  
DAERAH (STUDI KASUS PULAU JAWA DAN BALI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Ekonomi**

**BOBY WIJONARKO  
0706178895**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI  
KEKHUSUSAN EKONOMI PUBLIK  
DEPOK  
JUNI, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bobby Wijonarko

NPM : 0706178895

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juni 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Bobby Wijonarko  
NPM : 0706178895  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Faktor-faktor Lain Terhadap Konvergensi Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pulau Jawa dan Bali)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ari Kuncoro

Ketua Penguji : Prof. Dr. Nachrowi D. Nachrowi

Anggota Penguji : Dr. Diah Widyawati

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 18 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

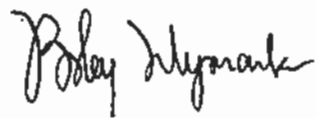
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Faktor-faktor Lain Terhadap Konvergensi Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pulau Jawa dan Bali)”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

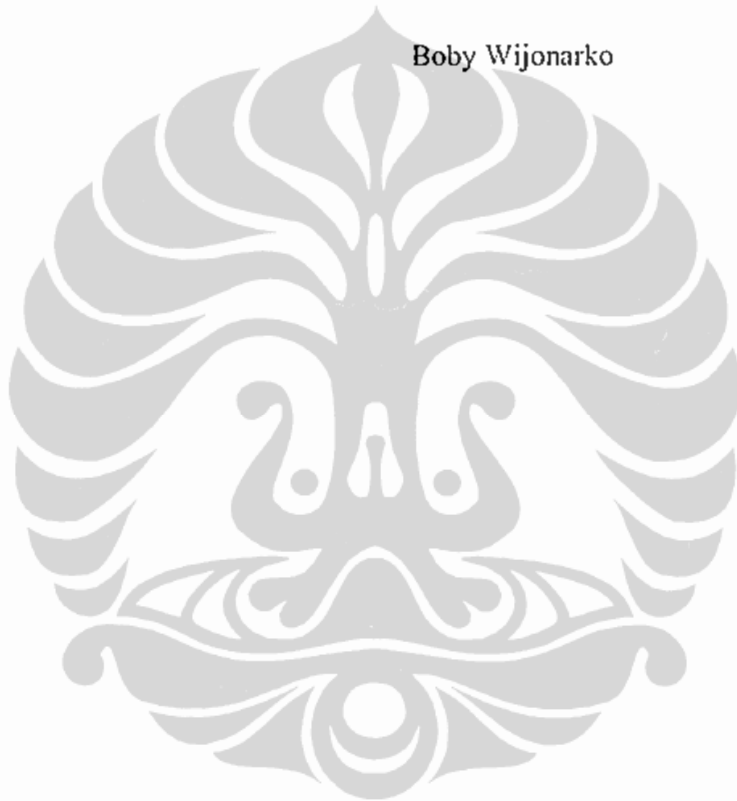
1. Bapak Dr. Ari Kuncoro, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran-saran dalam penyusunan tesis ini hingga selesai;
2. Bapak Prof. Dr. Nachrowi D. Nachrowi dan Ibu Dr. Diah Widayawati, selaku Penguji Tesis yang telah memberikan masukan demi perbaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Arindra A. Zainal, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta stafnya yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menempuh studi;
4. Pimpinan DJP dan BPPK yang telah memberikan kesempatan bagi penulis memperoleh beasiswa untuk menempuh studi S2 di Universitas Indonesia;
5. Bapak dan Ibu, isteriku Ike, anakku Athar, dan keluarga besarku di Jakarta, Makasar, Banjarmasin dan Purbalingga yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan ini;
6. Sahabatku : Mas Ro'is, Mas Sri Indriyanta, Kumara, Fanny, Dian P, Ilwa, Tuti, Mas Adi, Ikhwan, Tiyok, Wahidin, Yen Yen, Iin, Dian L, Hadad, Mas Mukhlas, Mas Eko, Agung, Ari, dan Raymond, yang bersama-sama penulis berjuang menyelesaikan studi;
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Depok, 18 Juni 2009



Boby Wijonarko



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik, Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Wijonarko  
NPM : 0706178895  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

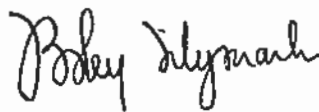
“Analisis Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Faktor-faktor Lain Terhadap Konvergensi Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pulau Jawa dan Bali)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 18 Juni 2009

Yang menyatakan



Bobby Wijonarko

## ABSTRAK

Nama : Bobby Wijonarko  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Faktor-faktor Lain Terhadap Konvergensi Laju Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pulau Jawa dan Bali)

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signifikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi fiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer bagi hasil pajak. Dengan adanya transfer ini kondisi keuangan daerah menjadi lebih kuat namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata-mata hanya ditentukan oleh peningkatan penerimaan daerah. Ada faktor-faktor lain yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah seperti kualitas pendidikan penduduk, simpanan penduduk, modal fisik berupa rumah, dan bagaimana pengeluaran pembangunan dialokasikan secara efektif dan efisien. Jika pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut maka konvergensi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil analisis data kerat lintang pada satu waktu yaitu tahun 2001 dengan menggunakan model OLS terhadap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali, bagi hasil pajak mempunyai pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun pengaruh positif tersebut tidak mampu menciptakan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi sebab bagi hasil pajak hanya berpengaruh signifikan di daerah kota. Selain itu, pemerintah daerah yang lebih miskin tidak mampu mengendalikan faktor-faktor yang menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat divergensi laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kuat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat pada sektor perpajakan dan perubahan tata kelola pemerintahan daerah agar konvergensi laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

### Kata kunci:

Laju pertumbuhan ekonomi, konvergensi, bagi hasil pajak, pengeluaran pemerintah daerah, OLS, daerah kabupaten dan kota



## ABSTRACT

Name : Bobby Wijonarko  
Study Program : Economic Science  
Title : The Analysis of The Effect of Tax Revenue Sharing and Other Factors to Economic Growth Convergence (Case Study in Java dan Bali)

The purpose of this study is to analysis the correlation of tax revenue sharing and other factors to economic growth convergence. The role of tax became more significant to state because almost 70% of state revenue was yield by tax. Along with the implementation of fiscal decentralization, tax become the share of local government revenue which given by central government in tax revenue sharing transfer form. Because of the transfer, the regional financial condition become stronger but the raising of regional economic growth is not depend only by the increase of regional revenue. There are other factors which have an important role to increase regional economic growth such as society education quality, society saving, physical capital (house), and how do the development expenditure allocated effectively and efficiently. If local government (regency and city) can control those factors so the high growth convergence can be achieve.

Based on the cross-section analysis at one time, 2001, using OLS model to the regency and city in Java and Bali, tax revenue sharing had positif effect to economic growth. Unfortunately, this effect could not create economic growth convergence because tax revenue sharing had only significant effect to city. Beside that, the poorer local government could not control the supporting factor of economic growth escalation so that the the divergence level of economic growth became stronger. Thus, it need the effective policy of taxes and the improvement of local governance in order to achieve the economic growth convergence.

**Key words:**

Economic Growth, convergence, tax revenue sharing, local government expenditure, OLS, regency and city.

## DAFTAR ISI

	hal	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.1.1.	Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah di Indonesia.....	1
1.1.2.	Bagi Hasil Pajak dan Kemajuan Daerah.....	5
1.2.	Perumusan Masalah.....	7
1.3.	Tujuan Penelitian.....	8
1.4.	Manfaat Penelitian.....	8
1.5.	Hipotesa Penelitian.....	9
1.6.	Kerangka Penelitian.....	9
1.7.	Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1.	Model Solow.....	11
2.1.1.	Konvergensi Absolut ( <i>Absolut Convergence</i> ).....	16
2.1.2.	Konvergensi Bersyarat ( <i>Conditional Convergence</i> ).....	19
2.2.	Perpajakan dan Desentralisasi Fiskal.....	21
2.3.	Penelitian-penelitian Sebelumnya.....	26
BAB III	PERKEMBANGAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA.....	31
3.1.	Perkembangan Desentralisasi Fiskal dari Segi Perundang-undangan.....	31
3.2.	Perkembangan Desentralisasi Fiskal dari Segi Pelaksanaan.....	34
BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN.....	39
4.1.	Spesifikasi Model dan Definisi Variabel.....	39
4.2.	Jenis dan Sumber Data.....	42
4.3.	Alasan Penggunaan Metode Estimasi OLS.....	42

BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1.	Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	44
5.2.	Hasil Estimasi Regresi.....	48
5.2.1.	Uji Signifikansi.....	48
5.2.2.	Uji Asumsi Dasar.....	50
	5.2.2.1. Uji Multikolinieritas.....	50
	5.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	50
5.3.	Analisis Ekonomi.....	51
5.3.1.	Analisis Konvergensi.....	51
5.3.2.	Analisis Bagi Hasil Pajak dan Pengeluaran Pembangunan.....	53
5.3.3.	Analisis Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Kemajuan Daerah.....	56
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1.	Kesimpulan.....	61
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	.....	63
LAMPIRAN	.....	65

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1 Instrumen Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 30 Kabupaten dan Kota Tertinggi di pulau Jawa dan Bali (periode tahun 2001 s.d. 2007) Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000.....	7
Tabel 4.1 Jenis, Tahun, dan Sumber Data.....	42
Tabel 5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, dan Bali Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000.....	45
Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000.....	46
Tabel 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000.....	46
Tabel 5.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000.....	47
Tabel 5.5 Hasil Estimasi Regresi Model 1 dan Model 2.....	49

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1.1 Peranan Instrumen Desentralisasi Fiskal dalam APBD tahun 2001....	3
Gambar 2.1 Model Solow.....	14
Gambar 2.2 Dampak Peningkatan Tabungan pada Investasi.....	15



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini penerimaan pajak telah menjadi sumber penerimaan negara yang dominan, yang tercermin dari peningkatan proporsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang mencapai  $\pm 70\%$  (jurnal Direktorat Jenderal Pajak, 2001). Sebagai sumber penerimaan yang dominan maka pajak berkaitan erat dengan kebijakan fiskal apa yang akan diambil oleh pemerintah. Secara garis besar, kebijakan fiskal berkaitan dengan fungsi pendapatan, alokasi, dan distribusi. Instrumen yang penting dalam kebijakan fiskal untuk memberikan stimulasi terhadap perekonomian (untuk pembangunan) adalah pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah yang strategis sebagian besar didanai dengan dana penerimaan pajak seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan alokasi untuk penanggulangan kemiskinan, pembayaran bunga dan cicilan hutang dan pemulihan ekonomi, alokasi sektor dasar, dan alokasi dana perimbangan untuk mendukung Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Pos pengeluaran pemerintah yang terkait dengan alokasi dana perimbangan merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang berupaya untuk mendistribusikan bagian dari penerimaan pajak guna kemajuan daerah sehingga pajak tidak saja memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 1.1.1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah bukan merupakan konsep baru dalam sistim pemerintahan Indonesia namun telah ada melalui Undang-undang yang diterbitkan pada masa Orde Baru (Orba) yaitu UU No.5 tahun 1974. Dalam otonomi daerah dikenal adanya Konsep Desentralisasi Fiskal yang menganut paham *Money Follow Functions* yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada Daerah. Namun Konsep Desentralisasi Fiskal masa lalu berbeda dengan saat ini sebab pada masa lalu pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan tepat karena pemerintahan cenderung sentralisasi. Praktek internasional baru dilaksanakan dengan baik melalui

UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU perubahan keduanya yaitu UU No.12 tahun 2008, serta UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Metode pokok desentralisasi ada 2 yaitu desentralisasi dari segi pengeluaran dan dari segi pendapatan. Desentralisasi dari segi pengeluaran diatur berdasarkan pada fungsi yang didaerahkan, dihitung besarnya perkiraan pengeluaran yang harus ditangani daerah untuk semua fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Desentralisasi dari segi pendapatan berarti memberikan peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan Pusat kepada Daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

Desentralisasi fiskal dari segi pengeluaran merupakan perubahan dalam urusan tanggung jawab pelayanan ke masyarakat dari pusat ke pemerintah daerah (peran *local public goods* meningkat) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 dilaksanakan melalui dua tahap:

1. memberi batasan pokok urusan pusat dan daerah secara umum: Pusat menangani 5 urusan pokok (Hankam, Luar negeri, Fiskal, Moneter, Agama) dan Daerah melakukan 11 urusan pelayanan publik wajib, dengan catatan, yang berskala nasional tetap di tangan pusat.
2. membagi urusan setiap bidang pelayanan publik diantara Pusat dan Provinsi, "sisanya" ditangani oleh Kabupaten/Kota.

Desentralisasi fiskal dari segi pendapatan memiliki 5 azas pokok yang harus ada dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. *Progressive redistributive taxes should be centralized*
2. *Taxes suitable for economic stabilization should be centralized*
3. *Unequal tax bases among jurisdictions should be centralized*
4. *Taxes on mobile factors of production should be centralized*
5. *Residence-based taxes, such as excise, should be levied by local authorities*

Berdasarkan azas diatas, hanya pajak wilayah yang tepat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di Indonesia, pajak yang memenuhi kriteria ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) namun sampai saat ini PPN bukan merupakan komponen bagi hasil pajak. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di

Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No.33 tahun 2004, yang memperjelas instrumen fiskal yang diberikan untuk mendukung proses desentralisasi fiskal. Indonesia termasuk negara yang terlengkap instrumen desentralisasi fiskal dari segi pendapatan seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

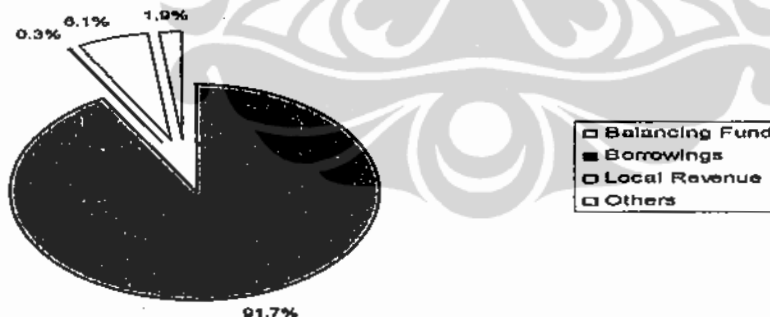
Tabel 1.1. Instrumen Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Kategori	Deskripsi	Contoh
Pajak Daerah	Basis dan Tarif ditangan Daerah	Pajak Hotel
Bukan Pajak	Retribusi dan Penerimaan lain dari jasa Pemerintah dan Pemda	Retribusi Daerah
Pajak overlap	Basis pajak nasional, tarif ditetapkan Daerah	Opsen pajak (belum ada, akan ada)
Bagi Hasil	Basis dan Tarif di tingkat nasional, tapi hasil dibagikan antara pusat dan Daerah	Bagi Hasil SDA, PBB, PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21
Bantuan Umum	Alokasi yang penggunaan sepenuhnya ditetapkan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)
Bantuan Khusus	Alokasi yang penggunaannya ditetapkan Pusat	Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

Peranan instrumen desentralisasi fiskal dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2001 dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1. Peranan Instrumen Desentralisasi Fiskal dalam APBD tahun 2001



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

Berdasar gambar 1.1 diketahui bahwa instrumen dana perimbangan memegang peranan penting dalam APBD sebab 91,7% dari total APBD konsolidasi kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan sedangkan 8,3% sisanya berasal dari pendapatan asli daerah, pinjaman, dan lainnya. Komponen dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bagi Hasil SDA),



Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana alokasi Khusus. Berdasar APBD konsolidasi kabupaten/kota tahun 2001 diketahui bahwa DAU merupakan kontributor terbesar untuk pendapatan daerah yaitu 84% dari total pendapatan daerah sedangkan sisanya, 10% berasal dari Bagi Hasil SDA, 5% berasal dari Bagi Hasil Pajak dan 1% berasal dari DAK.

Berdasarkan data diatas, seyogyanya DAU merupakan bagian dari pendapatan daerah yang paling banyak digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Faktanya, walaupun DAU merupakan komponen pendapatan terbesar daerah namun alokasi dari DAU sendiri ternyata lebih banyak ditujukan untuk belanja rutin. Hal ini tercermin dari Formula DAU itu sendiri. Sebagaimana diketahui formula DAU adalah:

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Berdasarkan formula tersebut, terlihat bahwa alokasi DAU dapat saja lebih banyak ditujukan untuk belanja rutin, dalam hal ini gaji PNS Daerah, bila Celah Fiskal tidak begitu besar. Jika ditinjau dari segi Celah Fiskalnya sendiri, yang merupakan selisih dari Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal maka dapat dipastikan bagian dari DAU yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembangunan tidak terlalu besar.

Sedangkan jika ditinjau dari dasar hukumnya yaitu UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan maka DAU lebih ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kata yang hurufnya ditebalkan menunjukkan DAU lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat daerah dan tidak dapat diartikan bahwa DAU secara khusus ditujukan untuk pembangunan. Namun kata tersebut bisa diartikan bahwa dalam DAU terdapat bagian untuk

pembangunan. Berdasarkan ulasan diatas, DAU tahun 2001 sebesar 84% dari pendapatan daerah tidak murni ditujukan untuk pembangunan daerah.

Jika DAU tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk pembangunan daerah maka bagian dari pendapatan daerah apa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan daerah. Hal ini perlu diketahui sebab adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. DAK sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan tersebut sebab hanya 1% dari komponen pendapatan daerah dan ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sedangkan Bagi Hasil SDA hanya ada dan bisa digunakan oleh daerah yang mempunyai SDA yang melimpah. Satu-satunya pilihan lain yang dapat digunakan oleh daerah untuk pembangunan adalah Bagi Hasil Pajak.

#### 1.1.2. Bagi Hasil Pajak dan Kemajuan Daerah

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA. Sumber dana Bagi Hasil Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH pasal 21).

Besaran dana Bagi Hasil Pajak akan berubah seiring dengan perubahan penerimaan pajak di provinsi dan/atau kabupaten dan kota yang bersangkutan, sehingga jika pada tahun 2001 jumlah dana Bagi Hasil Pajak untuk APBD konsolidasi kabupaten dan kota sebesar 5% dari komponen dana perimbangan maka pada tahun-tahun berikutnya dapat saja bertambah besar seiring dengan kenaikan penerimaan pajak. Korelasinya terhadap pembangunan adalah diharapkan dengan semakin besar dana Bagi Hasil Pajak maka semakin besar pula pengeluaran pembangunan sehingga diharapkan daerah yang bersangkutan akan semakin maju.

Pandangan tradisional terhadap pembangunan adalah pembangunan sama dengan pertumbuhan dengan asumsi *trickle down effect* (merembes) artinya pembangunan akan berhasil jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi ini akan memberikan dampak lebih jauh (merembes) pada kemajuan daerah. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada terciptanya kemajuan daerah. Pada saat ini pandangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ada paradigma baru yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan namun bukan merupakan kondisi yang mencukupi (*growth is necessary but not sufficient condition for development*) untuk terciptanya pembangunan yang berdampak pada kemajuan daerah.

Fakta menunjukkan bahwa tidak ada efek merembes pada pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemajuan daerah sebab pada beberapa daerah terjadi pertumbuhan ekonomi tanpa kemajuan daerah, yang terjadi adalah bahwa kemajuan daerah memberikan efek *trickle up* (merambat) pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pembangunan hanya dapat tercermin pada perubahan struktural yang menyangkut tiga permasalahan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan distribusi pendapatan.

Untuk mengetahui dampak pembangunan melalui perubahan struktural yang menyangkut tiga permasalahan di atas sangat sulit dilakukan sebab masing-masing indikator pada beberapa daerah menunjukkan hal yang saling berlawanan. Misalnya di satu kabupaten indeks kemiskinan dan pengangguran naik namun distribusi pendapatannya merata sedangkan di kabupaten lain indeks kemiskinan dan pengangguran turun namun distribusi pendapatan tidak merata, ataupun variasi lain dari tiga permasalahan tersebut. Satu-satunya solusi untuk mengetahui dampak pembangunan yang dilakukan adalah dengan mengetahui konvergensi laju pertumbuhan ekonomi seluruh daerah tersebut sebab indikator konvergensi laju pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah-daerah sebab mencerminkan adanya distribusi pendapatan yang merata, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Tiga puluh (30) daerah kabupaten dan kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan tahun 2000 dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing daerah di 115 daerah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali dan kemudian diurutkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ke yang terendah ditunjukkan oleh tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 30 Kabupaten dan Kota Tertinggi di pulau Jawa dan Bali (periode tahun 2001 s.d. 2007) Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan tahun 2000.

No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Sidoarjo	0.4454	16	Grobogan	0.3035
2	Kota Madiun	0.3807	17	Banyuwangi	0.2997
3	Kota Tegal	0.3797	18	Kota Bogor	0.2846
4	Pasuruan	0.3630	19	Tegal	0.2831
5	Tuban	0.3542	20	Karawang	0.2791
6	Banyumas	0.3538	21	Klaten	0.2773
7	Magetan	0.3461	22	Semarang	0.2739
8	Kota Bandung	0.3422	23	Malang	0.2723
9	Lumajang	0.3392	24	Kota Surabaya	0.2678
10	Rembang	0.3258	25	Jember	0.2671
11	Sukoharjo	0.3253	26	Kota Tangerang	0.2646
12	Purbalingga	0.3181	27	Kota Cilegon	0.2624
13	Jakarta	0.3180	28	Kudus	0.2611
14	Karang Anyar	0.3127	29	Purwokerto	0.2596
15	Kota Blitar	0.3083	30	Nganjuk	0.2505

Sumber: BPS (diolah)

Data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan tidak terdapat efek *trickle down* laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemajuan daerah dan lebih cenderung pada efek *trickle up* kemajuan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan lebih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dibandingkan kabupaten Purbalingga bahkan bila dibandingkan dengan kabupaten Sidoarjo. DKI Jakarta sebagai pusat sentralisasi kekuasaan dimasa lalu, saat ini kalah oleh kabupaten yang secara infrastruktur memiliki kondisi jauh dibawahnya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pembangunan saat ini cenderung untuk berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi namun pembangunan tersebut dapat berhasil atau tidak tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pembangunan (desentralisasi fiskal) tersebut dilaksanakan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas dan berkaca pada pengalaman negara maju yang menunjukkan bahwa pajak memegang peranan penting dalam pembangunan untuk kemajuan daerah. Disamping itu juga adanya data empiris bahwa perbedaan besaran dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tidak terlalu signifikan dibandingkan

dengan perbedaan Bagi Hasil Pajak di pulau lainnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan berikut ini:

1. Apakah Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah di pulau Jawa dan Bali?
2. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Jawa dan Bali dan bagaimana wujud korelasinya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali dan wujud korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan laju pertumbuhan ekonominya;

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi empiris tentang desentralisasi fiskal khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan pengaruhnya terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali. Sedangkan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu masukan untuk membuat kebijakan yang tepat bagi pengelolaan dan pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak sehingga dapat meningkatkan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada pemerataan pendapatan, turunnya tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang bermuara pada kemajuan daerah dan kesejahteraan bangsa dan negara.

### **1.5. Hipotesa Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif antara Bagi Hasil Pajak dengan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Bali.
2. Terdapat faktor-faktor lain seperti:
  - a. pengeluaran pembangunan pemerintah daerah setiap kabupaten dan kota;
  - b. jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA (D1, D3, S1, S2, & S3) di setiap daerah kabupaten dan kota;
  - c. jumlah sekolah negeri (SD, SMP, SMA, & SMK) di setiap daerah kabupaten dan kota;
  - d. jumlah rumah penduduk dengan status milik sendiri di setiap daerah kabupaten dan kota;
  - e. jumlah simpanan per kapita setiap daerah kabupaten dan kota;
  - f. tingkat kelahiran anak per keluarga setiap daerah;
  - g. tingkat angka harapan hidup setiap daerah kabupaten dan kota;
 yang secara signifikan mempengaruhi konvergensi laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali.

#### **1.6. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, analisis kualitatif, dan metode ekonometrika. Penelitian ini diawali dengan pengembangan kerangka analisis melalui serangkaian studi kasus yang diperoleh dari berbagai literatur dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana Bagi Hasil Pajak dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan data sekunder untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan pembangunan, dana Bagi Hasil Pajak dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah di pulau Jawa dan Bali serta permasalahan yang terkandung didalamnya kemudian mengevaluasinya dengan analisis ekonometrika.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab 1. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

#### **Bab 2. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini diuraikan teori Solow, konvergensi dan hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu diuraikan tentang perpajakan, desentralisasi fiskal, dan hubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini juga membahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang merupakan dasar analisis penelitian.

#### **Bab 3. Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Indonesia**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia dan kaitannya dengan kemajuan daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali.

#### **Bab 4. Metodologi Penelitian**

Bab ini akan menspesifikasikan model berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, serta teknik estimasi ekonometrika beserta pengujian terkait.

#### **Bab 5. Analisis dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan tentang pengolahan data, hasil estimasi, dan analisis secara ekonomi terhadap permasalahan.

#### **Bab 6. Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai keterbatasan penelitian.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Model Solow

Model Solow berfokus pada 4 variabel yaitu: output ( $Y$ ), modal ( $K$ ), pekerja ( $L$ ), dan "pengetahuan" atau keefektifan dari pekerja ( $A$ ). Pada setiap waktu, ekonomi memiliki sejumlah modal, pekerja, dan pengetahuan yang dikombinasikan untuk memproduksi output. Fungsi produksi berbentuk

$$Y(t) = F[K(t), A(t)L(t)] \quad (2.1)$$

dengan  $t$  menunjukkan waktu. Namun walaupun waktu berkaitan dengan fungsi produksi, waktu tidak dapat secara langsung mempengaruhi produksi namun melalui  $K$ ,  $L$ , dan  $A$ . Ini berarti output berubah sepanjang waktu hanya jika faktor input berubah. Secara umum dapat dikatakan, jumlah output diperoleh dari sejumlah modal dan pekerja yang ada dan meningkat sepanjang waktu. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi, hanya jika jumlah pengetahuan juga meningkat.

Dalam model ini,  $A$  dan  $L$  merupakan perkalian.  $AL$  dianggap sebagai pekerja efektif, dan perkembangan teknologi yang ada dalam model ini dikenal sebagai *labor-augmenting or Harrod-neutral*<sup>1</sup> yang menunjukkan bahwa  $A$  masuk bersama dengan asumsi lain dalam model sehingga menyebabkan rasio modal pada output,  $K/Y$ , biasanya menjadi tetap. Pada prakteknya, *capital-output ratio* tidak menunjukkan adanya kecenderungan naik atau turun sepanjang periode yang ditentukan. Asumsi yang digunakan pada model ini adalah:

##### 1. *Constant Return to Scale (CRS)*

Asumsi ini menunjukkan bahwa menggandakan jumlah modal dan pekerja efektif dengan menggandakan  $K$  dan  $L$  ( $A$  dianggap tetap) menyebabkan jumlah yang diproduksi menjadi berganda. Secara umum, memperkalikan kedua input dengan konstanta  $c$  akan menyebabkan output berubah sebesar  $c$ :

$$F(cK, cAL) = cF(K, AL) \text{ untuk seluruh } c \geq 0. \quad (2.2)$$

Dalam bentuk intensif,  $c = 1/AL$  dalam persamaan (1.2) menghasilkan

<sup>1</sup>jika pengetahuan masuk kedalam model dalam bentuk  $Y = F(AK, L)$ , perkembangan teknologi adalah *capital augmenting*, Jika masuk kedalam model dalam bentuk  $Y = AF(K, L)$ , perkembangan teknologi adalah *Hicks-Neutral*.



$$F\left[\frac{K}{AL}, 1\right] = \frac{1}{AL} F(K, AL). \quad (2.3)$$

disini  $K/AL$  adalah jumlah modal per unit pekerja efektif, dan  $F(K, AL)/AL$  adalah  $Y/AL$ , output per unit pekerja efektif, tentukan  $k = K/AL$ ,  $y = Y/AL$  dan  $f(k) = F(k, 1)$ , maka dapat ditulis

$$y = f(k). \quad (2.4)$$

2. Fungsi produksi bentuk intensif,  $f(k)$  diasumsikan memenuhi  $f(0) = 0$ ,  $f'(k) > 0$ ,  $f''(k) < 0$

Asumsi ini menunjukkan bahwa produk marjinal modal adalah positif, namun akan turun seiring dengan kenaikan modal (modal per unit pekerja efektif).

3. *Kondisi Inada* (Inada, 1964)

Kondisi ini menyatakan bahwa produk marjinal modal sangat besar ketika modal sangat kecil dan menjadi sangat kecil ketika modal menjadi sangat besar. Kondisi ini ditunjukkan dengan notasi:  $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$  dan  $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$ . Kondisi ini menjamin alur ekonomi tidak divergen.

Contoh khusus dari fungsi produksi ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas,

$$F(K, AL) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (2.5)$$

Jika fungsi ini diasumsikan CRS maka dengan memperkalikan kedua input dengan  $c$  akan diperoleh,

$$\begin{aligned} F(cK, cAL) &= (cK)^\alpha (cAL)^{1-\alpha} \\ &= c^\alpha c^{1-\alpha} K^\alpha (AL)^{1-\alpha} \\ &= cF(K, AL). \end{aligned} \quad (2.6)$$

Untuk menentukan bentuk intensif dari fungsi produksi, dengan membagi kedua input dengan  $AL$  akan diperoleh,

$$\begin{aligned} f(k) &\equiv F\left[\frac{K}{AL}, 1\right] \\ &= \left[\frac{K}{AL}\right]^\alpha \\ &= k^\alpha \end{aligned} \quad (2.7)$$

Jika model ditentukan dalam waktu yang berkelanjutan sebagai akibat dari perubahan modal, pekerja, dan pengetahuan sepanjang waktu, maka variabel harus

dijelaskan pada setiap titik pada waktu. Diasumsikan pekerja dan pengetahuan tumbuh pada tingkat yang tetap,

$$\dot{L}(t) = nL(t) \Leftrightarrow n = \dot{L}(t)/L(t) \quad (2.8)$$

$$\dot{A}(t) = gA(t) \Leftrightarrow g = \dot{A}(t)/A(t) \quad (2.9)$$

dengan  $n$  dan  $g$  adalah parameter eksogen dan titik diatas variabel menunjukkan turunan yang berkaitan dengan waktu. Jika kedua sisi dilinierkan dengan menggunakan  $\ln$  maka akan diperoleh,

$$\ln L(t) = [\ln L(0)] + nt \quad (2.10)$$

$$\ln A(t) = [\ln A(0)] + gt \quad (2.11)$$

dengan  $L(0)$  dan  $A(0)$  adalah nilai  $L$  dan  $A$  pada waktu 0. Kemudian kedua sisi dieksponekan sehingga didapat,

$$L(t) = L(0)e^{nt} \quad (2.12)$$

$$A(t) = A(0)e^{gt} \quad (2.13)$$

yang menunjukkan bahwa  $L$  dan  $A$  tumbuh secara eksponen.

Ekonomi berkembang sepanjang waktu sehingga akan lebih mudah untuk mengamatinya dengan lebih fokus pada modal per unit pekerja efektif,  $k$ , daripada modal yang tidak dapat disesuaikan,  $K$ . Dengan menggunakan metode rantai dan tambahan investasi,  $dk/dt = sY(t) - \delta K(t)$ , akan diperoleh,

$$\begin{aligned} \dot{k} &= \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{\dot{K}(t)}{[A(t)L(t)]^2} [A(t)\dot{L}(t) + L(t)\dot{A}(t)] \\ &= \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)} \frac{\dot{A}(t)}{L(t)} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Kemudian  $K/AL = k$ , persamaan (2.8) dan (2.9), dan  $\dot{k} = dk/dt = sY(t) - \delta K(t)$  disubstitusikan kedalam persamaan (2.14) menghasilkan,

$$\begin{aligned} \dot{k}(t) &= \frac{sY(t) - \delta K(t) - k(t)n - k(t)g}{A(t)L(t)} \\ &= \frac{sY(t)}{A(t)L(t)} - \delta k(t) - k(t)n - k(t)g \end{aligned} \quad (2.15)$$

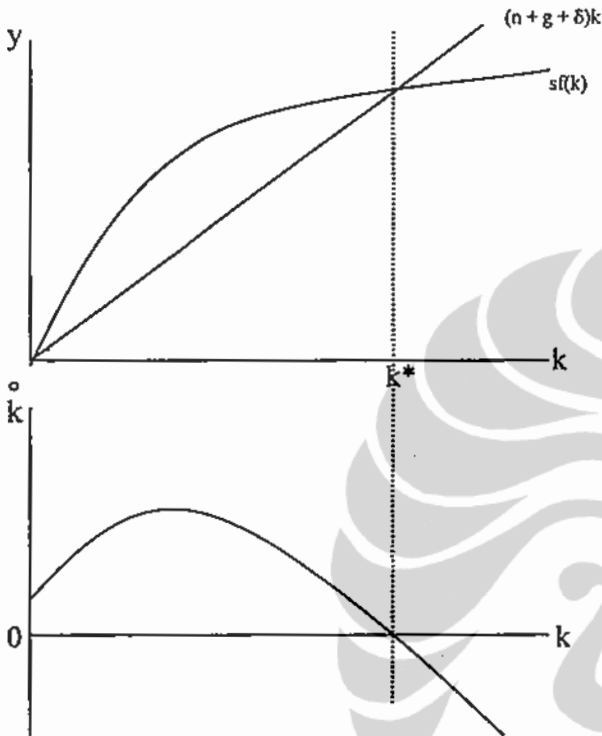
terakhir, gunakan fakta bahwa  $Y(t)/A(t)L(t) = f(k)$ , didapatkan rumus,

$$= sf(k(t)) - (n + g + \delta)k(t). \quad (2.16)$$

Persamaan (2.16) adalah persamaan kunci dari model Solow Yang menyatakan bahwa tingkat perubahan modal per unit pekerja efektif merupakan selisih antara investasi aktual per unit pekerja efektif dengan *breakeven investment*, yaitu jumlah investasi yang harus dilakukan agar dapat mempertahankan  $k$  pada

tingkat yang sama. Artinya adalah jika investasi aktual lebih besar dari *breakeven investment* maka  $k$  meningkat. Ketika investasi aktual lebih kecil dari *breakeven investment*,  $k$  turun. Jika keduanya sama maka  $k$  akan konstan. Persamaan (2.16) dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1. Model Solow



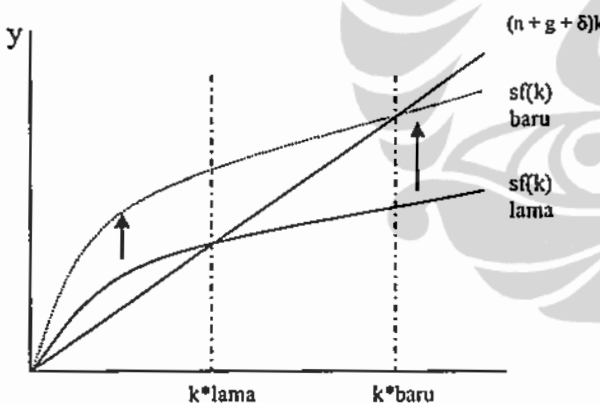
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa investasi aktual dan *breakeven investment* sama pada  $k = 0$ . Kondisi Inada menunjukkan pada  $k = 0$ ,  $f(k)$  besar, dan garis  $sf(k)$  lebih landai dari garis  $(n + g + \delta)k$ . Kemudian untuk nilai  $k$  yang kecil, investasi aktual lebih besar dari *breakeven investment*. Kondisi Inada juga menunjukkan bahwa  $f'(k)$  akan jatuh mendekati 0 jika  $k$  semakin besar. Pada beberapa titik, slope dari garis investasi aktual berada dibawah slope dari garis *breakeven investment*. Dengan garis  $sf(k)$  lebih landai dari garis  $(n + g + \delta)k$ , maka akan terjadi perpotongan. Dengan adanya fakta bahwa  $f''(k) < 0$  menunjukkan bahwa kedua garis berpotongan hanya sekali pada  $k > 0$  dan perpotongan tersebut,  $k^*$ , menunjukkan nilai  $k$  dimana investasi aktual sama dengan *breakeven investment*.

Gambar 2.1 juga menunjukkan informasi dalam bentuk diagram fase, yang menunjukkan  $dk/dt$  (tambahan investasi) sebagai fungsi dari  $k$ . Jika  $k$  lebih kecil

dari  $k^*$ , maka investasi aktual lebih besar dari dari *breakeven investment*, dan  $dk/dt$  positif, yang berarti meningkat. Jika  $k$  lebih besar dari  $k^*$ , maka  $\dot{k}$  negatif, yang berarti turun. Jika  $k = k^*$ , maka  $\dot{k} = 0$ . Jadi berawal dari posisi apapun  $k$  akan konvergen pada  $k^*$ .

Dengan asumsi, pekerja dan pengetahuan tumbuh pada tingkat  $n$  dan  $g$ . Modal,  $K$ , seimbang dengan  $ALk$  ( $k = K/AL$ ), pada  $k$  konstan di  $k^*$ ,  $K$  tumbuh pada tingkat  $n + g$ . Dengan modal dan pekerja efektif tumbuh pada tingkat  $n + g$ , asumsi CRS menyebabkan output,  $Y$ , juga tumbuh pada tingkat  $n + g$ . Akhirnya, modal per pekerja,  $K/L$ , dan output per pekerja,  $Y/L$ , tumbuh pada tingkat yang sama. Pada intinya, model Solow menyatakan bahwa tanpa memperhatikan darimana titik awalnya, ekonomi akan konvergen pada *balanced growth path* (suatu keadaan yang setiap variabel dari model tumbuh pada tingkat yang konstan). Pada *balanced growth path*, tingkat pertumbuhan output per pekerja ditentukan sepenuhnya oleh tingkat perkembangan teknologi atau pendidikan karena pendidikan akan mendorong terciptanya penemuan baru dan/atau aplikasi teknologi baru yang meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.2. Dampak Peningkatan Tabungan pada Investasi



Jika pada *balanced growth path* (alur pertumbuhan keseimbangan) terjadi peningkatan permanen tabungan (*saving*), maka peningkatan tabungan akan menggeser garis investasi aktual lebih tinggi sehingga  $k^*$  akan meningkat. Sebagaimana ditunjukkan gambar 2.2  $k$  akan seimbang dengan nilai lama dari  $k^*$ . Pada tingkat ini, investasi aktual melebihi *breakeven investment* dan  $\dot{k}$  positif. Hal ini membuat  $k$  mulai meningkat dan terus meningkat hingga menemukan nilai baru dari  $k^*$  dan pada titik ini  $k$  menjadi konstan.

Hal ini menunjukkan perubahan tabungan mempengaruhi pada level (*level effect*) tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan (*growth effect*). Perubahan tabungan mengubah alur pertumbuhan keseimbangan dan tingkat output per pekerja setiap waktu, tetapi tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan output per pekerja pada alur pertumbuhan keseimbangan. Jadi pada model Solow, hanya perubahan pada tingkat perkembangan teknologi yang mempengaruhi pertumbuhan sementara perubahan lain hanya mempengaruhi level.

#### 2.1.1. Konvergensi Absolut (*Absolut Convergence*)

Masalah yang menarik perhatian dalam kinerja empiris pertumbuhan adalah apakah negara-negara miskin cenderung untuk tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya. Ada tiga alasan terciptanya konvergensi ini. Pertama, model Solow memprediksi suatu negara akan konvergen pada alur pertumbuhan keseimbangannya. Lalu, dengan adanya perbedaan dalam output per pekerja terkait dengan alur pertumbuhan keseimbangannya, negara-negara miskin diharapkan dapat mengejar negara-negara kaya.

Kedua, model Solow menyatakan bahwa tingkat pengembalian modal akan lebih rendah pada negara-negara dengan modal per pekerja lebih besar. Hal ini merupakan insentif yang membuat modal mengalir dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dan cenderung menyebabkan konvergensi. Ketiga, jika terdapat ketinggalan dalam penerapan teknologi, maka perbedaan penghasilan dapat timbul sebab beberapa negara tidak menerapkan teknologi terbaik yang ada. Perbedaan ini mungkin cenderung menyusut ketika negara-negara miskin memperoleh akses untuk menerapkan metode teknologi tersebut.

Diasumsikan faktor-faktor yang menentukan penghasilan per kapita dalam jangka panjang relatif tetap sepanjang waktu pada semua negara. Hal ini berarti tingkat tabungan, lama pendidikan, dan faktor-faktor input dalam jangka panjang yang menentukan output diabaikan. Penghasilan suatu negara tidak dapat secara tiba-tiba melonjak ke alur jangka panjangnya. Contoh, jika modal fisik suatu negara dihancurkan oleh perang, pulihnya modal tersebut ke alur jangka panjangnya berlangsung secara bertahap. Selama proses pemulihan tersebut, modal per pekerja tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan normal, sehingga output per pekerja pun tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan normal. Secara umum, salah satu sumber

perbedaan tingkat pertumbuhan pada semua negara adalah perbedaan posisi-posisi awal negara-negara tersebut terhadap alur jangka panjangnya. Negara yang mulai dibawah alur jangka panjangnya tumbuh lebih cepat daripada negara-negara yang berada diatas alur jangka panjang.

Secara formal, untuk mempermudah diasumsikan bahwa perbedaan output per pekerja pada semua negara hanya disebabkan oleh perbedaan modal fisik per pekerja. Oleh karena itu, modal manusia per pekerja dan output yang dihasilkannya dianggap sama pada semua negara. Output ditentukan oleh fungsi produksi standar,  $Y_i(t) = F(K_i(t), A(t)L_i(t))$ , dengan tingkat pengembalian konstan. Dengan asumsi CRS, dapat ditulis output per pekerja suatu negara adalah sbb:

$$Y_i(t) = A(t)f(k_i(t)). \quad (2.17)$$

dengan asumsi input A sama untuk seluruh negara maka persamaan (2.17) menunjukkan bahwa perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi hanya berasal dari perilaku k.

Dalam model Solow dan Ramsey, setiap ekonomi mempunyai alur pertumbuhan keseimbangan nilai k, dan tingkat perubahan k diperkirakan proporsional dengan perpindahannya dari alur pertumbuhan keseimbangannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa,

$$\dot{k}_i(t) = \lambda[k_i^* - k_i(t)] \quad (2.18)$$

dimana  $k_i^*$  adalah alur pertumbuhan keseimbangan nilai k dalam negara i dan  $\lambda > 0$  adalah tingkat konvergensi. Persamaan (1.18) menunjukkan bahwa ketika suatu negara berada lebih jauh dibawah alur pertumbuhan keseimbangannya, modal per unit pekerja efektif meningkat dengan sangat cepat, dan pertumbuhan penghasilan per kapita (pekerja) menjadi lebih besar.

Terdapat dua kemungkinan berkaitan dengan nilai  $k_i^*$ . Pertama, nilai  $k_i^*$  sama pada seluruh negara. Dalam hal ini, seluruh negara mempunyai penghasilan per kapita yang pada alur pertumbuhan keseimbangannya. Selisih penghasilan rata-rata hanya berasal dari perbedaan posisi negara dalam hubungannya dengan alur pertumbuhan keseimbangan umum. Kemudian, pada kasus ini, model memprediksikan bahwa negara dengan penghasilan per kapita lebih rendah akan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat. Model ini dinamakan konvergensi tidak

bersyarat (*unconditional convergence*) atau konvergensi absolut (*absolute convergence*).

*Unconditional convergence* memberikan penjelasan bagus yang masuk akal mengenai perbedaan dalam pertumbuhan diantara negara-negara industri dalam periode setelah perang dunia II. Landasan jangka panjang berupa tingkat tabungan, tingkat pendidikan, dan insentif produksi yang tidak mengandung penyimpangan, secara umum sama pada negara-negara ini. Perbedaan signifikan yang ada pada negara-negara tersebut hanyalah pada penghasilan per kapita yang disebabkan oleh perbedaan dampak perang dunia II yang diterima negara-negara tersebut. Contoh, penghasilan per kapita Jepang dan Jerman berada dibawah USA dan Kanada. Lalu, bagian terbesar dari variasi penghasilan per kapita berasal dari perbedaan posisi dalam hubungannya dengan alur jangka panjangnya dan bukan perbedaan alur jangka panjangnya. Hasilnya, negara-negara maju yang termiskin pada awal periode setelah perang dunia II telah tumbuh sangat pesat (Dowrick dan Nguyen, 1989; Mankiw, D. Romer, dan Weil, 1992).

Kemungkinan kedua adalah bahwa  $k_i^*$  berbeda pada seluruh negara. Dalam hal ini, terdapat perbedaan komponen penghasilan seluruh negara yang tetap. Contohnya, negara miskin yang disebabkan tingkat tabungan yang rendah akan tidak mempunyai kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat daripada negara-negara lain. Tetapi perbedaan yang berasal dari perbedaan posisi negara-negara tersebut dalam hubungannya dengan alur pertumbuhan keseimbangannya secara bertahap akan menghilang seiring dengan adanya konvergensi terhadap alur pertumbuhan keseimbangannya. Artinya, model ini memprediksikan konvergensi bersyarat (*conditional convergence*) yaitu negara-negara yang lebih miskin setelah mengendalikan faktor-faktor yang menentukan penghasilan pada alur pertumbuhan keseimbangan tumbuh lebih cepat (Barro dan Sala-i-Martin, 1991-1992; Mankiw, Romer, dan Weil, 1992).

### 2.1.2. Konvergensi Bersyarat (*Conditional Convergence*)

Ide konvergensi ini timbul dalam kaitannya dengan situasi dimana perbedaan penghasilan tidak saja disebabkan perbedaan-perbedaan dalam modal fisik. Modal manusia, sebagaimana modal fisik, modal per pekerja tidak dapat bergerak secara tiba-tiba ke tingkat jangka panjang. Sebagai contoh, generasi muda

menghabiskan waktu lebih lama di sekolah daripada generasi sebelumnya, maka modal manusia per pekerja rata-rata meningkat secara bertahap seiring dengan pekerja-pekerja baru masuk dalam angkatan kerja dan pekerja-pekerja lama meninggalkan angkatan kerja. Alokasi sumber daya antara kedua modal tersebut tidak dapat berubah secara tiba-tiba ke alur jangka panjangnya. Artinya, negara-negara yang memulai pembangunan dengan penghasilan dibawah alur jangka panjangnya mengalami periode sementara dengan pertumbuhan yang tinggi seiring pergerakannya mendekati alur jangka panjangnya.

Diasumsikan faktor-faktor penentu dasar terhadap tingkat penghasilan per pekerja jangka panjang tetap. Asumsi ini diambil sebab faktor-faktor penentu dasar tersebut dapat merubah dan menjadi penyebab lain perbedaan dalam pertumbuhan diantara negara-negara. Seperti pada konvergensi absolut, diasumsikan bahwa perbedaan penghasilan per pekerja disebabkan perbedaan modal fisik per pekerja. Selain itu, ekonomi dianggap memiliki alur pertumbuhan keseimbangan yang merupakan tujuan konvergensi dalam ketidakhadiran kejutan-kejutan (*shocks*) dalam ekonomi.

Untuk menentukan formula konvergensi ini digunakan persamaan (2.18). Asumsi lainnya, pertumbuhan terjadi dalam beberapa interval waktu sehingga  $k_i^*$  dibuat tidak konstan, waktunya terpisah, dan berlangsung hanya dalam dua periode. Perubahan  $k_i$  dari periode  $t$  ke periode  $t+1$ , dinotasikan  $\Delta k_{it+1}$ , tergantung pada nilai dari  $k_i^*$  dan  $k_i$ . Persamaan yang analog dengan persamaan (1.18) adalah,

$$\Delta k_{it+1} = \lambda(k_{it}^* - k_{it}), \quad (2.19)$$

dengan  $\lambda$  diasumsikan berada diantara 0 s.d.1. Perubahan dalam  $k_i$  dari  $t$  ke  $t+2$  adalah sebagai berikut,

$$\Delta k_{it+1} + \Delta k_{it+2} = \lambda(k_{it}^* - k_{it}) + \lambda(k_{it+1}^* - k_{it+1}). \quad (2.20)$$

Untuk menginterpretasikan ekspresi ini ditulis ulang  $k_{it+1}^*$  sebagai  $k_{it}^* + \Delta k_{it+1}^*$  dan  $k_{it+1}$  sebagai  $k_{it} + \Delta k_{it+1}$  sehingga persamaan (1.20) menjadi,

$$\begin{aligned} \Delta k_{it+1} + \Delta k_{it+2} &= \lambda(k_{it}^* - k_{it}) + \lambda(k_{it}^* + \Delta k_{it+1}^* - k_{it} - \Delta k_{it+1}) \\ &= \lambda(k_{it}^* - k_{it}) + \lambda[k_{it}^* + \Delta k_{it+1}^* - k_{it} - \lambda(k_{it}^* - k_{it})] \\ &= [\lambda + \lambda(1 - \lambda)](k_{it}^* - k_{it}) + \lambda \Delta k_{it+1}^* \end{aligned} \quad (2.21)$$

dimana baris ke-2 menggunakan persamaan (2.19) untuk menggantikan  $\Delta k_{it+1}$ .



Persamaan diatas ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dalam 2 periode. Jika pertumbuhan ekonomi dalam periode berkesinambungan, berarti waktu tidak terpisah sehingga persamaan (2.18) menunjukkan bahwa perubahan k pada beberapa interval, katakanlah dari 0 s.d. T, adalah

$$k_{i(T)} - k_{i(0)} = (1 - e^{-\lambda T})[k_{i(0)}^* - k_{i(0)}] + \int_{\tau=0}^T ((1 - e^{-\lambda(T-\tau)})k_{i(\tau)}^* dt. \quad (2.22)$$

Persamaan (2.21) dan (2.22) menunjukkan bahwa perubahan k sepanjang beberapa interval dapat dikomposisikan ulang menjadi 2 bagian. Bagian pertama tergantung pada posisi asal suatu negara terhadap alur pertumbuhan keseimbangannya. Bagian ini merupakan dampak konvergensi bersyarat yang dibicarakan diatas. Bagian kedua tergantung pada perubahan alur pertumbuhan keseimbangan selama interval. Peningkatan dalam alur pertumbuhan keseimbangan nilai k, contohnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, dalam kasus waktu berkesinambungan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan lebih besar jika hal tersebut terjadi lebih awal pada interval.

Sederhananya, analisis ini fokus pada modal fisik. Tetapi secara analog, hasilnya dapat diaplikasikan pada modal manusia dan efisiensi: pertumbuhan ekonomi tergantung pada posisi asal terhadap alur pertumbuhan keseimbangan suatu negara dan pada perubahan alur pertumbuhan keseimbangannya. Seluruh konvergensi tergantung tidak hanya pada distribusi posisi asal terhadap alur jangka panjangnya dan pada penyimpangan keberadaan alur jangka panjangnya, tetapi juga pada distribusi perubahan dalam faktor-faktor penentu dasar alur jangka panjang suatu negara. Contohnya, bisa jadi seluruh konvergensi terjadi sebagai hasil konvergensi faktor-faktor dasar suatu negara.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah penghasilan rata-rata suatu negara berada jauh dibawah penghasilan rata-rata penghasilan rata-rata dunia sebab penghasilan rata-rata negara tersebut berada jauh dibawah alur jangka panjangnya atau alur jangka panjangnya memang memiliki penghasilan yang rendah. Dalam kasus kedua, negara dapat bertumbuh dengan sangat cepat dengan memperbaiki faktor-faktor dasarnya. Contoh, negara tersebut mengadopsi peraturan dan institusi yang terbukti berhasil di negara yang lebih makmur.

Dalam kasus konvergensi antar daerah di dalam suatu negara, perbedaan yang umumnya terjadi pada konvergensi antar negara seperti teknologi, preferensi

dan institusi tetap ada namun tidak terlalu signifikan. Teknologi, tingkat penyerapan teknologi dan teknologi yang digunakan daerah dalam satu negara cenderung sama. Preferensi, masyarakat dalam satu negara secara kasar memiliki rasa dan budaya yang hampir sama. Institusi, dikarenakan daerah-daerah berada dibawah naungan satu pemerintah pusat maka pemerintahan daerah memiliki kemiripan bentuk dan sistem hukum. Selain itu perpindahan input cenderung lebih mobil antar daerah dibandingkan antar negara sebab hambatan hukum, kebudayaan, bahasa, dan institusi lebih kecil dibandingkan antar negara. Disini asumsi perekonomian tertutup – kondisi standar pada model pertumbuhan neoklasik – cenderung dilanggar untuk data regional/daerah.

Diketahui bahwa syarat dinamis ekonomi yang terbuka untuk perpindahan modal dapat mirip dengan yang terjadi pada perekonomian tertutup. Elemen kunci adalah bagian dari modal (termasuk modal manusia) tidak berpindah dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi kredit internasional atau *interregional*. Kecepatan konvergensi bertambah dengan keberadaan perpindahan modal, tetapi tetap dalam selisih sempit yang wajar dari nilai yang logis dari bagian modal yang berpindah. Hasil lainnya adalah teknologi tanpa *diminishing return to capital* menunjukkan kecepatan konvergensi nol baik perekonomian tertutup ataupun terbuka. Jadi intinya meskipun daerah dalam satu negara relatif terbuka terhadap arus modal dan penduduk, model pertumbuhan neoklasik tetap dapat memberikan kerangka yang berguna untuk analisis empiris.

## 2.2. Perpajakan dan Desentralisasi Fiskal

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tujuan memberikan stimulasi terhadap perekonomian. Dana pajak kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah seperti program kesra, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, dan pertahanan. Namun pajak adalah kewajiban/paksaan dan pajak tidak harus selaras dengan benefit yang diterima, karena ada fungsi *income redistribution*. Hubungan antara besaran pajak dan benefit/manfaat lemah sebab ada insentif untuk

menghindar (*free-rider*) karena pengeluaran pemerintah umumnya digunakan untuk penyediaan barang publik yang bersifat *non excludable* atau siapapun dapat menggunakan tanpa ada batasan.

Disamping masalah benefit, ada beberapa masalah yang menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam perpajakan yaitu:

1. *Tax Burden* (Beban pajak), yaitu: pajak diukur atas dasar implikasi perpajakan kepada penanggung beban pajak langsung, maupun tidak langsung. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan kepada konsumen, pada mulanya hanya konsumen yang menanggung pajak, tetapi akhirnya produsen pun ikut menanggung beban.
2. *Tax Incidence* (Penanggung Pajak), yaitu: menetapkan pihak mana dalam masyarakat (perekonomian) yang menjadi penanggung beban pajak akhir, bukan hanya penanggung beban menjawab menurut undang-undang/peraturan, tetapi yang secara ekonomi menjadi penanggung beban pajak.
3. *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak), yaitu: pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan dan/atau celah peraturan (*loopholes*), misalnya donasi, zakat, charity dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
4. *Tax Evasion* (Penggelapan pajak) yaitu pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan faktor-faktor yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Di Negara maju diukur dengan besarnya jumlah uang cash yang dipakai untuk transaksi.

*Tax burden* erat kaitannya dengan *tax incidence*. *Tax burden* terjadi karena *tax incidence* yang tidak tepat. Hal ini terjadi karena pembuat peraturan mungkin bukan seseorang yang harus membayar pajak tersebut. Pajak yang ditujukan untuk orang kaya bisa jadi akhirnya dibebankan ke orang miskin. Bukan "niat" tetapi "konsekuensi" yang harus diperhitungkan.

Dalam ilmu ekonomi, baik atau buruk dilihat dari *efficiency* dan *equity*, begitu pula halnya dengan pajak. Desain dan implementasi dari kebijakan pajak seharusnya sederhana secara administratif (*administrative simplicity*) sehingga penarikan pajak efisien. Efisiensi juga mengandung konsep "*opportunity cost*", artinya penarikan pajak juga harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan

untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak (*Tax payment*) seperti: transfer, yang tidak efisien sehingga mengakibatkan hilangnya kesejahteraan (*welfare loss*), yang ditandai dengan adanya distorsi pajak berupa gap antara harga konsumen dan harga produsen dapat mendorong *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Dari segi *equity* (pemerataan), *equity* terdiri dari tiga prinsip. Pertama, prinsip *absolut equity*, yaitu prinsip yang menyatakan setiap orang membayar pajak sesuai bagiannya, yang ditentukan dengan membagi nilai pengeluaran pemerintah dengan jumlah penduduk. Kedua, prinsip kemampuan untuk membayar. Prinsip ini berdasar pada ide bahwa beban membayar pajak, yang dinilai berdasarkan uang, seharusnya sama bagi setiap orang (*the equal marginal sacrifice principle*). Ketiga, prinsip pemerataan distribusi yang disebut prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh penduduk membayar barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan jumlah yang dikonsumsi. Namun dari ketiga prinsip tersebut, prinsip mana yang akan dilaksanakan tergantung pada arena politik. Teori ekonomi hanya dapat memberikan penilaian tentang konsekuensi dari keputusan yang dibuat masyarakat dan siapa yang menjadi pemenang atau pecundang.

Permasalahan pajak pada negara berkembang adalah sebagian besar pekerja umumnya bekerja pada sektor pertanian atau perusahaan kecil dan informal. Sektor pertanian sangat sulit untuk dipajaki sebab tidak tercatat dengan baik. Pajak tanah menjadi tidak populer. Sebenarnya ada pajak ekspor pertanian, tetapi penghasilan sangat tidak stabil tergantung fluktuasi harga dunia. Disamping itu terdapat kesulitan untuk menciptakan administrasi pajak yang efisien sebab kurangnya pegawai terdidik dan terlatih, kurangnya dana untuk membayar gaji yang cukup untuk pegawai-pegawai pajak dan mengkomputerisasikan operasi, dan pembayar pajak mempunyai keterbatasan membuat laporan keuangan.

Sektor informal ekonomi dan keterbatasan keuangan menyebabkan statistik menjadi tidak realistis. Akibatnya timbul kekurangan data yang baik sehingga menyebabkan pembuat keputusan sulit menentukan bagaimana pengaruh dari perubahan besar sistem pajak. Penghasilan cenderung tidak terdistribusi dengan merata dan kekuasaan berada ditangan orang kaya sehingga mempengaruhi kebijakan pajak. Dampaknya pada negara berkembang adalah kebijakan pajak merupakan seni kemungkinan dan bukanlah penyesuaian untuk optimalitas.

Permasalahan lainnya adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang mendorong pertumbuhan angkatan kerja, tingginya proporsi anak-anak, dan rendahnya proporsi pensiunan. Pendirian sekolah-sekolah merupakan prioritas pendanaan pajak lokal. Sayangnya, kondisi ekonomi memberikan tingkat penerimaan pajak lokal yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya sekolah-sekolah yang mengakibatkan rendahnya tingkat kemampuan baca tulis. Rendahnya kemampuan baca tulis dan kurangnya pekerja terdidik menimbulkan masalah kepatuhan untuk pembayaran pajak yang rumit seperti pajak penghasilan dan perusahaan. Dampak dari semua permasalahan tersebut adalah kurangnya dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Permasalahan perpajakan yang dijelaskan diatas hanya permasalahan dari segi pengumpulan pajak. Dari segi pengeluaran, pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dibiayai pajak memiliki permasalahan tersendiri. Pertama, alokasi pengeluaran yang tidak tepat. Pemerintahan yang besar, dalam arti pemerintahan dengan wilayah yang sangat luas, banyak menghabiskan dana pada fungsi yang kurang produktif. Kedua, rendahnya efisiensi yang disebabkan kapasitas administrasi yang lemah yang disebabkan terlalu banyaknya tanggung jawab yang diemban. Ketiga, pembiayaan pengeluaran publik yang tinggi membutuhkan pajak yang besar sehingga mengabaikan insentif untuk tabungan, investasi, dan fasilitas kerja. Dampak negatif dari ketiga permasalahan tersebut akan dirasakan lebih kuat pada pemerintahan yang lemah.

Sebagai antisipasi terhadap pemerintahan yang besar diterapkan konsep desentralisasi fiskal. Konsep ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyat. Manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat mengeksploitasi keuntungan informasi untuk mendorong partisipasi politik penduduk. Dalam konsep desentralisasi fiskal juga terdapat aturan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk memenuhi kesenjangan fiskal vertikal dan horizontal, dan menjamin jumlah tingkat nasional pengeluaran pemerintah daerah. Ada 2 jenis transfer yaitu bersyarat (*conditional*) dan tidak bersyarat (*unconditional*). Penggunaan transfer bersyarat hanya diperbolehkan ketika pengeluaran lokal mengandung *spillovers* (jumlah pengeluaran

daerah melebihi jumlah yang dapat ditanggung) dan kebutuhan minimal nasional yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah seperti pendidikan dan kesehatan.

Konsekuensi desentralisasi fiskal adalah meningkatnya proyek populis untuk memenuhi permintaan politik dari para koruptor/pelobi untuk pengeluaran publik yang lebih ditujukan untuk kepentingan perorangan daripada kepentingan pembangunan/efisiensi. Bahaya lain yang potensial adalah pengeluaran pembangunan menjadi sumber korupsi pegawai pemerintah daerah/politisi yang ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Adanya desentralisasi fiskal juga menimbulkan persaingan antar pemerintah daerah. Brennan dan Buchanan menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai pencari penghasilan maksimal atau Leviathan daripada pemberi kesejahteraan sesuai dengan undang-undang (1980), akibatnya tercipta persaingan. Sesuai dengan model Tiebout, tercipta pasar persaingan yang menempatkan pemerintah daerah dalam posisi bersaing antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan pelanggan, yaitu penduduk. Persaingan tersebut menimbulkan masalah-masalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Dampak yang timbul akibat persaingan antar pemerintah daerah

Form	Source	Benefit	Cost
Horizontal	Mobility of economic factors	Discipline on governments	Beggar-thy-neighbor politics

Sumber: Stiglitz

Perpindahan penduduk atau yang dikenal dengan nama *voting with feet* menimbulkan konsekuensi pemerintah daerah memproduksi jasa publik untuk memenuhi preferensi penduduk dengan biaya minimal dan individu akan bertindak sesuai dengan preferensi/penghasilan, yang pada akhirnya mendukung pengurangan konflik politik dalam satu yurisdiksi (kewenangan hukum).

Hal terpenting dalam penerapan desentralisasi fiskal ini adalah menghindari kemunduran suatu daerah sebagai akibat dari penyelewengan pengeluaran pemerintah yang dananya berasal dari pajak baik pajak lokal maupun bagi hasil pajak, dan persaingan antar pemerintah daerah seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah (1404) yaitu "*It should be known that at the beginning of the dynasty, taxation yields a large revenue from small assesments. At the end of the dynasty, taxation yields a small revenue from large assesments*".

### 2.3. Penelitian-penelitian Sebelumnya

Baumol (1986) menguji konvergensi dari tahun 1870 sampai dengan 1979 diantara 16 negara-negara industri yang datanya disediakan oleh Maddison (1982). Baumol meregresikan pertumbuhan output sepanjang periode tersebut terhadap konstanta dan penghasilan awal sebagaimana terlihat dibawah ini.

$$\ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1979} \right] - \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right] = a + b \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right] + \varepsilon_i \quad (2.23)$$

Dalam rumus ini,  $\ln(Y/N)$  adalah log penghasilan per kapita,  $\varepsilon$  adalah error, dan  $i$  adalah indeks negara-negara. Jika terdapat konvergensi,  $b$  akan negatif, artinya negara dengan penghasilan awal tinggi memiliki pertumbuhan yang lebih rendah. Nilai  $b = -1$  menunjukkan konvergensi sempurna, artinya penghasilan awal yang tinggi rata-rata lebih rendah pertumbuhan berikutnya dengan skala 1:1, dan output per kapita dalam tahun 1979 tidak berkorelasi dengan output per kapita pada tahun 1870. Nilai  $b = 0$ , sebaliknya, menunjukkan pertumbuhan tidak berkorelasi dengan penghasilan awal sehingga tidak terjadi konvergensi.

Hasil regresi yang diperoleh oleh Baumol adalah,

$$\ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1979} \right] - \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right] = 8,457 + 0,995 \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right] + \varepsilon_i$$

$$R^2 = 0,87, \text{ s.e.e} = 0,15. \quad (2.24)$$

Angka dalam kurung, 0.094 menunjukkan standar error dari koefisien regresi yang berarti rentang selisih diantara 16 negara tersebut. Regresi ini menunjukkan hasil konvergensi hampir sempurna. Estimasi  $b$  hampir sama dengan  $-1$  dan diestimasi secara tepat didalam interval keyakinan standard-error yaitu (0,81, 1,18). Dalam contoh ini, penghasilan per kapita saat ini tidak berkorelasi dengan penghasilan per kapita 100 tahun yang lalu.

Kontra dengan Baumol, DeLong (1988) berpendapat, bagaimanapun, temuan Baumol sangat meragukan. Ada 2 masalah yang menyebabkan keraguan temuan ini. Pertama, data adalah *sample selection*. Mengingat data historis dibuat dengan meninjau jauh kebelakang, negara-negara yang memiliki serial data yang panjang umumnya adalah sebagian besar negara-negara industri saat ini. Oleh karena itu negara yang tidak kaya 100 tahun yang lalu biasanya diambil sebagai *sample* bila negara-negara tersebut tumbuh sangat cepat sepanjang 100 tahun berikutnya. Negara-negara yang kaya 100 tahun yang lalu, sebaliknya, umumnya

termasuk dalam *sample* bila pertumbuhan ekonomi berikutnya hanya berada pada level moderat. Itulah sebabnya, negara-negara yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari negara-negara yang kaya pada *sample* yang diambil, walaupun tidak ada kecenderungan untuk hal ini dianggap sebagai rata-rata.

Cara yang alami untuk menghilangkan bias adalah menggunakan aturan berupa pilihan *sample* yang tidak berdasar variabel yang sedang dijelaskan, yaitu pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1870 s.d. 1979. Kekurangan data membuat tidak mungkin untuk memasukkan negara-negara di seluruh dunia. DeLong kemudian menyadari negara-negara terkaya pada tahun 1870; khususnya, *sample*-nya terdiri dari seluruh negara yang sedikitnya kekayaannya sama dengan negara termiskin kedua pada *sample* Baumol pada tahun 1870, Finlandia. Ini yang menyebabkan DeLong menambah 7 negara baru dalam daftar Baumol (Argentina, Chili, Jerman Timur, Irlandia, Selandia Baru, Portugal, dan Spanyol) dan membuang satu negara (Jepang). Data baru ini melemahkan temuan konvergensi Baumol. Regresi menunjukkan estimasi  $b$  sebesar  $-0,566$ , dengan standard error  $0,144$ . Artinya, perhitungan DeLong terhadap bias seleksi yang terdapat dalam prosedur Baumol menghilangkan hampir setengah konvergensi yang Baumol temukan.

Masalah kedua yang diidentifikasi oleh DeLong adalah kesalahan penentuan (*measurement error*). Estimasi penghasilan riil per kapita tahun 1870 tidak tepat. Kesalahan penentuan membuat sekali lagi bias dalam upaya menemukan konvergensi. Ketika penghasilan tahun 1870 dinyatakan diatas yang seharusnya (*overstate*), pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1870 s.d. 1979 menjadi dibawah yang seharusnya (*understate*) dalam jumlah yang sama; begitu pula sebaliknya jika penghasilan tahun 1870 *understate*. Pertumbuhan ekonomi yang ditentukan cenderung lebih rendah pada negara yang penghasilan awalnya ditentukan lebih tinggi bahkan jika tidak terhadap hubungan antara pertumbuhan aktual dengan penghasilan awal aktual.

DeLong kemudian membuat model berikut:

$$\ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1979} \right] - \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right]^* = a + b \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right]^* + \varepsilon_i \quad (2.25)$$

$$\ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right] = a + b \ln \left[ \left[ \frac{Y}{N} \right]_{i,1870} \right]^* + u_i \quad (2.26)$$



disini  $\ln[(Y/N)_{1870}]^*$  adalah nilai yang benar dari log penghasilan per kapita dalam tahun 1870 dan  $[(Y/N)_{1870}]$  adalah nilai yang ditentukan.  $\varepsilon$  dan  $u$  diasumsikan tidak ada korelasi satu sama lain dan dengan  $\ln[(Y/N)_{1870}]^*$ . Sayangnya estimasi tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan data  $\ln[(Y/N)_{1870}]$  dan  $\ln[(Y/N)_{1979}]$  sebab ada perbedaan hipotesis yang membuat prediksi menjadi sama. Contohnya, anggap ditemukan pertumbuhan ekonomi yang ditentukan berkaitan secara negatif dengan penghasilan awal. Hal ini adalah sesuatu yang diharapkan baik jika kesalahan penentuan tidak penting dan konvergensi benar maupun jika kesalahan penentuan penting dan tidak ada konvergensi yang benar. Secara teknis, model ini tidak dapat diidentifikasi.

DeLong berpendapat, bagaimanapun juga, setidaknya ada ide kasar tentang bagaimana bagusnya data tahun 1870, dan dapat diterima sebagai nilai standar deviasi yang masuk akal dari kesalahan penentuan. Contohnya,  $\sigma_u = 0,01$  menunjukkan bahwa model dapat menentukan penghasilan awal dalam rata-rata 1% , dan ini kelihatannya rendah. Sementara itu  $\sigma_u = 0,50$  (kesalahan rata-rata 50%) kelihatannya tinggi. DeLong menunjukkan bahwa jika nilai  $\sigma_u$  diperbaiki maka dapat diestimasi parameter-parameter lainnya.

Bahkan kesalahan penentuan yang moderat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil. Untuk sampel yang tidak bias, estimasi  $b$  mencapai 0 (tidak ada kecenderungan konvergen) untuk  $\sigma_u \approx 0,15$  dan +1 (divergensi yang luar biasa) untuk  $\sigma_u \approx 0,20$ . Jumlah yang masuk akal dari kesalahan penentuan menghilangkan sebagian besar atau seluruhnya dari estimasi konvergensi Baumol.

Berdasarkan analisis statistik Parente dan Prescott (1993), yang mendukung DeLong, yang mempelajari 102 negara sepanjang periode 1960-1985, diketahui standar deviasi penghasilan pada negara-negara tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 18,5% selama periode tersebut, yang artinya tidak mengarah pada konvergen. Untuk negara-negara eropa barat, standar deviasi menunjukkan penurunan. Sedangkan untuk negara-negara asia, standar deviasi menunjukkan kenaikan dan signifikan yang artinya terjadi divergensi atau ketidakteraturan.

Analisis-analisis yang dikemukakan diatas ditujukan untuk konvergensi antar negara. Analisis-analisis tersebut tentu akan berbeda hasilnya bila diterapkan untuk konvergensi wilayah dalam satu negara. Meskipun perbedaan dalam

teknologi, preferensi, dan institusi juga terjadi antar wilayah, namun perbedaan-perbedaan ini sepertinya lebih kecil daripada yang terjadi antar negara. Perusahaan dan rumah tangga dalam satu negara cenderung memiliki akses yang sama untuk teknologi sejenis, dan memiliki selera dan kebudayaan yang secara kasar hampir sama. Hasil analisis Barro (1991a) dan Barro dan Sala-i-Martin (1991,1992a,1992b) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di USA sejak tahun 1880, daerah-daerah di Jepang sejak tahun 1950, dan daerah-daerah di negara-negara Eropa menunjukkan adanya konvergensi absolut.

Hasil penelitian pada 122 negara berdasar data Summers dan Heston (1993) terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh penelitian Dowrick dan Nguyen (1989) dan Barro dan Sala-i-Martin (1991,1992a,1992b). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan tingkat harapan hidup memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi pada kondisi dengan tingkat penghasilan asal yang rendah. Kedua faktor tersebut membuat konvergensi lebih cepat ke posisi *steady state*-nya. Selain itu faktor lainnya seperti kesenjangan dan ukuran pemerintahan, rasio konsumsi pemerintah, keuntungan pasar gelap perdagangan luar negeri, dan ketidakstabilan politik memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kelahiran anak per keluarga (*fertility*) juga memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tingkat investasi memiliki hubungan yang rendah dengan pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang berkaitan dengan konvergensi di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Yayat Hidayat (2008) dan Ayu Sawitri Gama (2007). Yayat Hidayat dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat konvergensi laju pertumbuhan ekonomi pada daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat pada tiga periode penelitian yaitu periode 1993 - 2006 ( $\beta = -0,0262$ ), periode 1993 - 1999 ( $\beta = -0,0418$ ), dan periode 2000 - 2006 ( $\beta = -0,0350$ ), namun tingkat konvergensi pada periode tersebut tidak terlalu besar. Sedangkan Ayu Sawitri Gama dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat divergensi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di provinsi Bali pada periode 1993 - 2006 dengan  $\beta = 0,049$ .

Beralih ke masalah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian Roy Bahl dan Johannes Linn (1992) menyatakan desentralisasi fiskal meningkatkan level dari pertumbuhan ekonomi (hal 391); tingkat ambang dasar pembangunan ekonomi dengan desentralisasi fiskal yang menarik cenderung menunjukkan peningkatan (hal 393). Pada negara-negara industri, rasio desentralisasi fiskal menunjukkan puncaknya pada tahun 1950 dan pada tahun setelahnya menunjukkan penurunan pada beberapa kasus (Oates 1978; Werner Pommerehne 1977). Tetapi apa yang terjadi pada negara maju tidak ada hubungan dengan negara-negara berkembang sebab memiliki titik awal yang berbeda (Diana Conyers, 1990).

Sementara itu terkait dengan perpajakan, pemerintah provinsi dan kabupaten dalam negara-negara berkembang sering menghadapi rintangan yang serius mengenai *tax bases* (dasar pajak). Bahl dan Linn menyatakan pada negara berkembang daerah-daerah perkotaan cenderung lebih potensial untuk beberapa pajak dibandingkan daerah pedesaan. Penelitian di Indonesia, Aina Sabedah Fitri (2008), menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia (2008).

## BAB 3

### PERKEMBANGAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

#### 3.1. Perkembangan Desentralisasi Fiskal dari Segi Perundang-undangan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sebenarnya telah dimulai pada tahun 1975 berdasarkan UU No. 5 tahun 1974. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal pada masa ini tidak tepat sebab pada prakteknya penyelenggaraan keuangan daerah lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Seiring dengan perubahan kondisi politik tanah air yang memasuki periode reformasi maka konsep desentralisasi fiskal didengungkan kembali dengan diterbitkannya UU No.25 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan konsep internasional, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dan diganti dengan UU No.33 tahun 2004.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dipandang perlu mengingat pengalaman yang dialami daerah-daerah pada masa orde baru yang cenderung lebih bersifat sentralisasi dan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pada masa orde baru terdapat kecemburuan antara satu daerah terhadap daerah yang lain khususnya daerah yang memiliki banyak sumber daya alam dengan yang tidak. Sebagai contoh, provinsi Aceh dikenal sebagai penghasil sumber daya alam namun perkembangan pembangunan di daerah tersebut berjalan di tempat. Banyak penghasilan yang diterima dari sumber daya alam Aceh dialokasikan untuk pembangunan di daerah lain seperti daerah-daerah di pulau Jawa khususnya Jakarta ataupun provinsi Timor Timur (sebelum menjadi negara sendiri). Kecemburuan tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada usaha-usaha maker atau pemberontakan. Kondisi tersebut menyebabkan para pemegang kekuasaan pada masa reformasi berusaha untuk menghindarinya dengan menerapkan desentralisasi fiskal dengan cara yang lebih baik..

Jika perubahan peraturan diatas lebih mengarah pada perubahan dasar penerapan konsep desentralisasi, maka sebenarnya perubahan juga terjadi pada peraturan yang mengatur komponen desentralisasi fiskal. Salah satu komponen yang mengalami perubahan adalah komponen lokasi bagi hasil pajak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan yang dilakukan adalah mengenai

perubahan besaran imbalan alokasi bagi hasil pajak. Sebagaimana diketahui, dana Bagi Hasil Pajak berasal dari PPh OP, PPh pasal 21, PBB, dan BPHTB. Pada masing-masing jenis pajak tersebut, besaran imbangannya telah diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, besaran imbalan transfer Bagi Hasil Pajak PBB yang diatur berdasarkan UU No.12 tahun 1985 menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak yang bersumber dari PBB yang merupakan penerimaan negara akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I, sedangkan sisanya 10% untuk Pemerintah Pusat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1985, bagian bagi hasil untuk daerah sebesar 90% diatur sebagai berikut:

1. Dari 90% bagian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebesar 10% (atau 9%) dipotong oleh Pemerintah Pusat sebagai biaya pemungutan.
2. Hasil penerimaan yang telah dipotong biaya pemungutan kemudian dibagikan kepada daerah dengan imbalan 20% (atau 16,2%) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 80% (atau 64,8%) untuk pemerintah Daerah Tingkat II.

Untuk bagi hasil pajak yang bersumber dari BPHTB, berdasarkan Keputusan Menteri 519/KMK.04/2000 diatur bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari BPHTB akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Bagian untuk daerah dibagi lagi dengan imbalan 16% untuk daerah Provinsi dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota.

Terakhir untuk bagi hasil pajak yang bersumber dari PPh OP, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.115 tahun 2000 diatur bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari PPh OP akan dibagi antara pemerintah Pusat dengan Daerah dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagian untuk Pemerintah Daerah dibagi lagi dengan imbalan 40% untuk daerah provinsi dan 60% untuk daerah kabupaten/kota.

Kemudian peraturan perundang-undangan yang lama tersebut diubah berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, formula Bagi Hasil kepada daerah menjadi sebagai berikut:

1. Bagi Hasil PPh OP dan PPh pasal 21 dibagi menjadi:
  - a. Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Dana bagi hasil kepada daerah pada poin a dibagi dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
    - 2) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
  - c. Dana bagi hasil untuk kabupaten/kota pada poin b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
    - 2) 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar
2. Bagi Hasil PBB dibagi menjadi:
  - a. 10% untuk Pusat, dikembalikan lagi kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun berjalan, dengan imbalan:
    - 1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota;
    - 2) 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
  - b. Dana bagi hasil PBB kepada daerah sebesar 90%, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
    - 2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
    - 3) 9% untuk biaya pemungutan.
3. Dana bagi hasil BPHTB dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 20% untuk Pusat, dikembalikan lagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota;
- b. 80% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - 2) 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jumlah 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, diperinci sebagai berikut :

- a. 16% untuk Daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbalan :
  - 1) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan;
  - 2) 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Provinsi;
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil, yang dibagi dengan imbalan :
  - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan;
  - 2) 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

### 3.2. Perkembangan Desentralisasi Fiskal dari Segi Pelaksanaan

Konsep desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya tentu mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang timbul dalam desentralisasi fiskal dari segi pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Urusan minimal yang harus ditangani kabupaten/kota untuk setiap bidang pelayanan belum jelas,
2. Standar pelayanan minimal untuk setiap jenis pelayanan belum ada.

Dampak dari 2 hambatan diatas adalah sulitnya melakukan estimasi *Standard Spending Assessment (SSA)* atau estimasi batasan pengeluaran standar

sehingga berakibat lebih jauh pada kemungkinan kegagalan pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan stimulasi terhadap kemajuan daerah yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu hambatan desentralisasi fiskal dari segi pendapatan adalah penggunaan instrumen ini belum efisien dan efektif. Banyak terdapat persoalan yang berkaitan dengan pemerataan (keadilan), transparansi proses dan sosialisasi konsep sehingga dampaknya mengganggu tercapainya sasaran desentralisasi fiskal yaitu kemajuan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal seyogyanya berbanding lurus dengan kemajuan daerah tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak daerah yang tidak menunjukkan peningkatan kemajuan daerah yang tercermin pada lambannya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan tidak terjadi pemerataan pendapatan. Hal tersebut tercermin pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi periode tahun 2001 s.d. 2007 di beberapa daerah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali bahkan beberapa diantaranya minus yaitu kabupaten Pamekasan (-0,65), kabupaten Ponorogo (-0,44), kabupaten Situbondo (-0,22), dan kabupaten Pacitan (-0,21). Disamping itu banyak kasus korupsi terungkap di sejumlah instansi birokrasi pemerintah. Hingga tahun 2009 ini sudah lebih dari 27 pejabat walikota, bupati, dan gubernur di Tanah Air yang terlibat dalam kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan milyar rupiah yang tentu saja menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak tepat dan kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan kelemahan pelaksanaan desentralisasi fiskal dari segi pengeluaran. Ada keterkaitan erat antara pengeluaran pemerintah daerah yang tidak tepat dengan kasus-kasus korupsi tersebut. Dari beberapa kasus yang terungkap, uang negara yang dikorupsi berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk mengkorupsi dana APBD paling mudah dilakukan karena terkait langsung dengan posisi dan wewenang pejabat di instansi pemerintah yang berhak mengeluarkan dana untuk APBD, baik untuk kepentingan dana rutin operasional kantor instansi pemerintah maupun untuk pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga.

Menurut Uten Sutendy, pengamat otonomi daerah, modus korupsi yang sering dilakukan saat ini adalah :



1. Oknum pejabat bekerjasama dengan berbagai asosiasi kontraktor dan konsultan dalam menentukan syarat-syarat tambahan dalam kegiatan tender selain yang diatur oleh Undang-undang. Contoh: setiap peserta tender harus menunjukkan kartu atau surat keanggotaan salah satu asosiasi pengusaha, kontraktor, atau konsultan, padahal dalam undang-undang (Keppres No.80/2003) hal tersebut bukan merupakan persyaratan.
2. Membangun kolaborasi antara oknum pejabat dengan anggota dewan dalam menetapkan judul proyek di dalam daftar isian proyek (DIP) atau mengesahkan pengeluaran uang negara melalui persetujuan anggota dewan secara kolektif. Contoh: kasus korupsi kolektif yang dilakukan pejabat kabupaten Pandeglang dengan anggota dewan yang menyepakati peminjaman sebesar 200 milyar rupiah ke Bank Jabar yang kemudian dipertanyakan keabsahannya.
3. Membuat komitmen di muka dengan menentukan nilai *cash back* (nilai uang yang akan diberikan kepada instansi).
4. Dengan menggunakan pola 'pinjam bendera'. Mekanisme tender tetap dilaksanakan namun keikutsertaan perusahaan-perusahaan lain hanya bersifat pengembira dengan fee 2-3% bila nama perusahaannya dipinjam.
5. Dengan menggunakan mekanisme program 'sumbangan' atau 'bantuan'.
6. Penyerahan uang dalam bentuk tunai.

Praktik-praktik ini terus berlangsung hingga kini dan berdampak merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak (Media Indonesia, 04-02-2009).

Akibat tindakan korupsi yang sulit diberantas membuat keberadaan APBD ironis. Nilai uang APBD dari tahun ke tahun terus membengkak jumlahnya, tetapi angka kemiskinan relatif belum berkurang, pembangunan infrastruktur jalan tiap tahun tambal sulam karena kualitas pembangunan jalan yang sangat buruk. Tarif angkutan, tol, listrik, PDAM, dan telepon terus naik, sedangkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah masih jauh dari kata memuaskan. Yang paling anyar adalah tragedi Situ Gintung pada tanggal 27 Maret 2009 yang menunjukkan kelalaian pemerintah daerah dalam merespon keluhan warga. Selain itu terdapat banyak kasus dana APBD parkir pada SBI, obligasi pemerintah, dan bank untuk mengharapkan pendapatan bunga sehingga akhirnya tidak memberikan stimulasi terhadap pembangunan.

Konsep desentralisasi fiskal dalam lingkup otonomi daerah juga terkait dengan pemekaran daerah. Untuk pulau Jawa dan Bali saja sepanjang periode 2001 s.d. 2007 telah terjadi 5 pemekaran daerah kabupaten dan kota. Tambahan kabupaten dan kota tersebut adalah kota Cimahi, Banjar, Tasikmalaya, Batu dan kabupaten Bandung Barat. Total sejak tahun 1999 s.d. 2008 telah terbentuk 202 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 161 kabupaten, dan 34 kota. Hasil penelitian yang dilakukan Departemen Keuangan menunjukkan 80% daerah otonomi baru telah menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaan anggaran (Media Indonesia, 16-02-2009). Hanya sedikit daerah otonomi baru yang menunjukkan keberhasilan, selebihnya ada daerah yang terus bergantung pada pemerintah pusat dalam hal keuangan dan rakyatnya terabaikan.

Lebih dari separuh daerah otonom baru (DOB) gagal membawa kesejahteraan rakyat didaerahnya. DOB yang gagal didominasi daerah yang berada di kawasan Indonesia bagian timur. Padahal, tujuan pembentukan daerah otonom bertujuan mendorong prakarsa masyarakat untuk secara kompetitif membangun daerahnya. Antara lain pembuatan jaringan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Akan tetapi, pada kenyataannya usaha-usaha pemekaran wilayah dinodai kepentingan segelintir elit daerah yang mengupayakan pemekaran untuk menggiring uang dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Unsur politis sangat kental bermain ditandai dengan banyaknya usulan pemekaran berasal dari DPR sedangkan anggota DPR tidak mempunyai desain tentang pemekaran daerah, akibatnya daerah yang belum layak dimekarkan akhirnya dimekarkan.

Berdasarkan paparan diatas dapat dibayangkan apa yang terjadi bila tanggung jawab pengumpulan pajak PBB dan BPHTB dibebankan kepada pemerintah daerah mengikuti wacana yang berkembang saat ini, mengingat pengelolaan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah yang masih kurang baik. Adanya masalah pengelolaan anggaran tersebut ditambah lemahnya pengawasan keuangan daerah dan belum siapnya pegawai pemerintah daerah untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan (PBB & BPHTB) seperti alih teknologi untuk basis data pemantauan dan penilaian obyek PBB dan BPHTB,

mekanisme pembayaran dan pemenuhan kewajiban pajak, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak PBB dan BPHTB yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat akan menyebabkan pendelegasian wewenang tersebut (desentralisasi fiskal dari segi pendapatan) menjadi ladang baru korupsi yang dampaknya justru akan mengurangi pendapatan daerah.

*Voting with feet* bukan merupakan hal yang mustahil terjadi jika pengenaan pajak diwarnai kasus korupsi. Hal lain yang dapat terjadi adalah kemunduran/kehancuran daerah tersebut yang ditandai dengan merosotnya jumlah pendapatan pajak walaupun jumlah pelaporan tinggi. Terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menyebabkan kemajuan daerah secara keseluruhan tidak tercapai sebab dalam wacana konvergensi masalah yang menimpa suatu daerah berpengaruh terhadap kemajuan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan paparan diatas menunjukkan desentralisasi fiskal cenderung memberikan dampak negatif terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi (kemajuan daerah) dan bukan sebaliknya. Tentu saja, paparan ini perlu didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan. Namun bila ternyata hasil penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan paparan diatas, maka nampaknya Indonesia harus mulai belajar dari Jepang yang melakukan merger daerahnya sejak tahun 1980 karena ada kesadaran bahwa semakin kecil sebuah daerah akan semakin lemah, boros, dan bergantung pada pemerintah pusat atau jikapun tetap melakukan pemekaran harus disertai dengan desain pemekaran yang tepat.

## BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

### 4.1. Spesifikasi Model dan Definisi Variabel

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dasar pemikiran untuk mengambil wacana konvergensi daerah adalah untuk menyesuaikan penelitian dengan paradigma pembangunan ekonomi baru yaitu adanya pemerataan pembangunan, rendahnya tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, yang mendorong konvergensi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk melakukan analisis ini penulis menggunakan metode ekonometrika *Ordinary Least Square (OLS)*.

Estimasi dilakukan terhadap kemajuan daerah di pulau Jawa dan Bali sejak tahun 2001 s.d. 2007. Periode tersebut digunakan sebagai dasar analisis sebab perubahan undang-undang bagi hasil pajak yang signifikan terjadi pada tahun 2000 dan efektif diberlakukan pada tahun 2001. Pada tahun 2000, dana bagi hasil pajak tidak hanya berasal dari PBB saja, tetapi telah ditambah dengan BPHTB dan PPh OP, sedangkan tahun 2007 diambil sebagai batas akhir periode penelitian disebabkan data yang bisa diperoleh terbatas hanya sampai pada tahun tersebut dan data tahun-tahun setelahnya belum tersedia.

Data yang menjadi bahan observasi adalah data 115 daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali yang telah ada pada tahun 2001. Hal ini dilakukan mengingat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 di Pulau Jawa dan Bali terdapat pemekaran daerah kabupaten dan kota sehingga kabupaten dan kota bertambah menjadi 120 kabupaten dan kota. Tambahan kabupaten dan kota baru tersebut adalah kota Cimahi, Banjar, Tasikmalaya, Batu dan kabupaten Bandung Barat. Dengan tujuan untuk mempermudah penelitian, mengingat keterbatasan data dan adanya kesamaan ukuran, daerah yang diobservasi adalah daerah yang sudah ada pada tahun 2001. Pulau Jawa dan Bali diambil sebagai sampel Indonesia sebab besaran transfer Bagi Hasil Pajak pada pulau-pulau ini tidak jauh berbeda, begitu pula dengan selisih laju pertumbuhan ekonominya.

Model yang digunakan dalam persamaan OLS ini mengadopsi model yang dikemukakan oleh Baumol (1986), DeLong (1988), Barro (1990), dan Romer (1990). Model ini menggunakan 1 (satu) variabel terikat (*dependent variable*) yaitu laju pertumbuhan PDRB per kapita, 1 (satu) variabel bebas (*independent variable*) yang menjadi dasar penentuan konvergensi yaitu logaritma natural PDRB per kapita pada tahun 2001, dan beberapa variabel-variabel bebas lain sebagai faktor kondisi/syarat dan pendukung. Model dibersihkan dari pengaruh inflasi untuk melihat produktifitas daerah.

Model ini menggunakan model logaritma natural untuk variabel terikat dan beberapa variabel bebasnya. Logaritma natural digunakan untuk melihat elastisitas dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan menghilangkan kesenjangan data antara data yang berupa persentase dengan nominal.

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{\ln Y_{i,2007}}{N_{i,2007}} - \frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}} &= \beta_0 + \beta_1 \frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}} + \beta_2 \ln Pdd_{i,2001} + \beta_3 \ln Rmh_{i,2001} + \beta_4 \ln \\ &\frac{Y_{i,2001}}{N} * \ln Pdd_{i,2001} + \beta_5 \ln Sek_{i,2001} + \beta_6 \ln Simp_{i,2001} + \beta_7 \\ &TFR_{i,2001} + \beta_8 AHH_{i,2001} + \beta_9 \ln BHP_{i,2001} + \beta_{10} \ln PPD_{i,2001} \\ &+ \varepsilon_t \end{aligned} \quad (4.1)$$

dan,

$$\begin{aligned} \frac{\ln Y_{i,2007}}{N_{i,2007}} - \frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}} &= \beta_0 + \beta_1 \frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}} + \beta_2 \ln Pdd_{i,2001} + \beta_3 \ln Rmh_{i,2001} + \beta_4 \ln \\ &\frac{Y_{i,2001}}{N} * \ln Pdd_{i,2001} + \beta_5 \ln Sek_{i,2001} + \beta_6 \ln Simp_{i,2001} + \beta_7 \\ &TFR_{i,2001} + \beta_8 AHH_{i,2001} + \beta_9 \ln BHP_{i,2001} + \beta_{10} \ln PPD_{i,2001} \\ &+ \beta_{10} D + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (4.2)$$

dimana :

$\frac{\ln Y_{i,2007}}{N_{i,2007}} - \frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}}$  = laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali periode tahun 2001-2007 (selisih logaritma natural PDRB per kapita tahun 2007 dengan 2001) berdasar PDRB dengan harga konstan tahun 2000.

$\frac{\ln Y_{i,2001}}{N_{i,2001}}$  = logaritma natural PDRB per kapita setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.

- $\text{LnPdd}_{i,2001}$  = logaritma natural jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA (D1/D3/S1/S2/S3) di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\text{LnRmh}_{i,2001}$  = logaritma natural jumlah rumah penduduk dengan status milik sendiri di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\frac{\text{LnY}}{N_{i,2001}} * \text{LnPdd}_{i,2001}$  = hasil perkalian dari log PDRB per kapita tahun awal dengan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA di setiap daerah di pulau Jawa dan Bali (dianggap sebagai suatu penyimpangan dari rata-rata sampel).
- $\text{LnSek}_{i,2001}$  = logaritma natural jumlah sekolah negeri (SD, SMP, SMA, & SMK) di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\text{LnSimp}_{i,2001}$  = logaritma natural jumlah simpanan per kapita ( giro, tabungan, dan deposito) penduduk di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\text{AHH}_{i,2001}$  = Angka Harapan Hidup penduduk di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\text{TFR}_{i,2001}$  = *Total Fertility Rate* penduduk di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali.
- $\text{LnBHP}_{i,2001}$  = logaritma natural dana bagi hasil pajak yang ditransfer kepada setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- $\text{LnPPD}_{i,2001}$  = logaritma natural pengeluaran pembangunan pemerintah daerah di setiap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001.
- Dummies (D)* = Mencerminkan perbedaan antara daerah kabupaten dengan kota dalam kurun waktu 7 tahun sejak tahun 2001 s.d. 2007, yaitu:
- $D = 1 \rightarrow$  daerah kota di pulau Jawa dan Bali.
- $D = 0 \rightarrow$  daerah kabupaten di pulau Jawa dan Bali.

## 4.2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Bentuk data yang digunakan adalah data panel PDRB berdasar harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu 7 tahun yaitu tahun 2001 – 2007 dan data daerah kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali pada tahun 2001.

Secara lebih lengkap sumber data yang digunakan dirangkum pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Jenis, Tahun, dan Sumber Data

No	Jenis Data	Tahun	Sumber
1	PDRB setiap daerah di 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali berdasar harga konstan tahun 2000	2001-2007	Biro Pusat Statistik
2	Jumlah penduduk di setiap daerah di 115 Kabupaten/Kota di pulau Jawa & Bali	2001-2007	Biro Pusat Statistik
3	Bagi hasil pajak setiap daerah di 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali	2001	Departemen Keuangan
4	APBD Realisasi setiap daerah 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali	2001	Departemen Keuangan
5	Jumlah simpanan penduduk setiap daerah di 115 kabupaten/ kota di pulau Jawa & Bali	2001	Bank Indonesia
6	Jumlah sekolah negeri pada 115 kabupaten/ kota di pulau Jawa & Bali (SDN, SMPN, SMUN, & SMKN)	2001	Biro Pusat Statistik
7	Jumlah rumah penduduk dengan status milik sendiri di setiap daerah di 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali	2001	Biro Pusat Statistik
8	Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA di setiap daerah di 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali	2001	Lembaga Demografi UI
9	Tingkat Angka Harapan Hidup setiap daerah di 115 kabupaten/kota di pulau Jawa & Bali	2001	Biro Pusat Statistik
10	Tingkat Kelahiran Anak per Keluarga (TFR) setiap daerah di 115 kabupaten di pulau Jawa & Bali	2001	Biro Pusat Statistik

## 4.3. Alasan Penggunaan Metode Estimasi OLS

Metode estimasi yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode estimasi OLS. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan

antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Sebagaimana diketahui variabel-variabel bebas dalam model analisis regresi yang telah disebutkan sebelumnya adalah pencerminan dari modal dasar suatu daerah baik itu modal fisik, manusia, maupun finansial. Bagaimana pengaruh modal dasar tersebut terhadap variabel terikat yaitu laju pertumbuhan ekonomi akan lebih tepat digambarkan dengan metode estimasi OLS daripada metode estimasi lainnya sebab bentuk hubungan yang hendak diketahui hanya terjadi pada satu waktu yaitu tahun 2001 dan tidak terjadi dalam satu periode yang berkesinambungan.

Selain itu, model yang digunakan berasal dari model pertumbuhan modal yang diadopsi dari teori *Conditional Convergence* atau  $\beta$  *Convergence* yang dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut:

$$k_{i(T)} - k_{i(0)} = (1 - e^{-\lambda T})[k_{i(0)}^* - k_{i(0)}] + \int_{\tau=0}^T ((1 - e^{-\lambda(T-\tau)})k_{i(\tau)}^* d\tau . \quad (4.3)$$

Persamaan (4.1) tersebut analog dengan perubahan output ( $y$ ) sebab  $y = f(k)$ , sehingga persamaan (4.1) dapat diubah menjadi persamaan berikut :

$$y_{i(T)} - y_{i(0)} = (1 - e^{-\lambda T})[y_{i(0)}^* - y_{i(0)}] + \int_{\tau=0}^T ((1 - e^{-\lambda(T-\tau)})y_{i(\tau)}^* d\tau . \quad (4.4)$$

Persamaan (4.2) diatas jika diinterpretasikan secara ekonometrika diperoleh model sebagai berikut :

$$\ln \frac{Y}{N_{i,t}} - \ln \frac{Y}{N_{i,0}} = \alpha + \beta \ln \frac{Y}{N_{i,t}} + \varphi_i S_{i,t} + \varepsilon_i . \quad (4.5)$$

Persamaan (4.3) diatas kemudian disesuaikan dengan variabel yang hendak diteliti dan diperoleh model sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu model (4.1) dan (4.2) yang merupakan model estimasi OLS dengan menggunakan logaritma natural pada variabel bebasnya. Dengan kata lain, metode estimasi OLS sesuai dengan dasar teori yang digunakan.



## BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator terpenting pada penelitian ini sebab merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan baik berdasar paradigma lama maupun paradigma baru walaupun terdapat perbedaan mendasar antara dua paradigma tersebut. Perbedaan paradigma lama dengan paradigma baru adalah paradigma lama hanya menganggap penting laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan paradigma baru menganggap penting konvergensi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di seluruh daerah. Mengingat hal tersebut, pengolahan data diawali dengan menentukan laju pertumbuhan ekonomi pada seluruh daerah di pulau Jawa dan Bali.

Analog dengan persamaan (2.12) dan (2.13), output per kapita,  $Y/N = y$ , dapat ditentukan sebagai berikut:

$$y(t) = y(0)e^{pt} \quad (4.1)$$

$$\ln y(t) = \ln y(0) + pt \quad (4.2)$$

$$\ln y(t) - \ln y(0) = pt \quad (4.3)$$

$$\ln \frac{Y(t)}{N} - \ln \frac{Y(0)}{N} = pt \quad (4.4)$$

dimana  $p$  = laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan asumsi  $t$  dianggap 1 periode (berapapun jumlah tahunnya), persamaan (4.4) inilah yang digunakan oleh Baumol, dan peneliti lainnya dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, dan begitu pula cara penentuan laju pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota dalam provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dibuat dengan menggunakan data PDRB per kapita berdasar harga konstan tahun 2000. Untuk provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi dibuat dalam lingkup provinsi dengan tujuan untuk kesamaan ukuran sebab pencatatan APBD provinsi DKI Jakarta tidak dibuat per kota/wilayah namun per provinsi. Hasil perhitungan dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan jumlah kabupaten/kotanya, yaitu sebagai berikut:

## 1. Provinsi DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta dan Bali

Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi di empat provinsi ini dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta dan Bali Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000

No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	DKI Jakarta	0.3180	11	Kab Tangerang	0.1810
2	Kota Tangerang	0.2646	12	Kab Sleman	0.1771
3	Kab Kulon Progo	0.2443	13	Kab Serang	0.1704
4	Kab Klungkung	0.2294	14	Kab Bangli	0.1651
5	Kota Denpasar	0.2290	15	Kab Badung	0.1607
6	Kab Tabanan	0.2254	16	Kota Yogyakarta	0.1425
7	Kab Gianyar	0.2243	17	Kab Karang Asem	0.1401
8	Kab Buleleng	0.2036	18	Kab Bantul	0.1354
9	Kab Gunung Kidul	0.1990	19	Kab Lebak	0.0625
10	Kab Pandeglang	0.1969	20	Kab Jembrana	0.0532

Sumber : BPS (diolah)

Berdasar tabel 5.1 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta adalah yang tertinggi di empat provinsi tersebut. Hal ini wajar sebab provinsi DKI Jakarta merupakan pusat sentralisasi kekuasaan pada masa orde baru. Urutan kedua tertinggi adalah kota Tangerang dan selanjutnya diikuti oleh kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Klungkung (hanya berbeda tipis dengan kota Denpasar). Laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah kabupaten Jembrana. Kemudian urutan kedua terendah adalah kabupaten Lebak, diikuti kabupaten Bantul, dst.

Fakta ini menunjukkan bahwa paradigma lama tentang pembangunan yang menyatakan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak *trickle down* tidak terbukti sebab kabupaten Lebak yang secara posisi dekat dengan provinsi DKI Jakarta ternyata berada di urutan kedua terendah, sebaliknya kabupaten Kulon Progo yang jauh dari sentral kekuasaan justru berada pada posisi ketiga tertinggi. Artinya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta tidak memberikan dampak *trickle down* pada daerah disekitarnya.

## 2. Provinsi Jawa Barat

Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Periode tahun 2001 s.d. 2007  
Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000

No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Bandung	0.3422	12	Kab Cirebon	0.1843
2	Kota Bogor	0.2846	13	Kab Ciamis	0.1803
3	Kab Karawang	0.2791	14	Kab Purwakarta	0.1793
4	Kota Cirebon	0.2358	15	Kab Indramayu	0.1648
5	Kota Depok	0.2063	16	Kab Cianjur	0.1288
6	Kab Majalengka	0.2049	17	Kota Bekasi	0.1228
7	Kab Bandung	0.2013	18	Kab Sumedang	0.1219
8	Kab Subang	0.1970	19	Kab Kuningan	0.1045
9	Kab Bogor	0.1957	20	Kab Sukabumi	0.1000
10	Kota Sukabumi	0.1934	21	Kab Tasikmalaya	0.0897
11	Kab Bekasi	0.1895	22	Kab Garut	0.0711

Sumber : BPS (diolah)

Berdasar tabel 5.2 terlihat bahwa kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat yang sejak dulu telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tetap berada di urutan tertinggi yaitu Kota Bandung, Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Cirebon. Sedangkan daerah kabupaten dan kota yang berada pada posisi terendah adalah daerah yang sejak dulu kurang diperhatikan seperti Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi.

### 3. Provinsi Jawa Tengah

Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Periode tahun 2001 s.d. 2007  
Berdasar PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000

No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Tegal	0.3797	19	Kab Magelang	0.2103
2	Kab Banyumas	0.3538	20	Kab Boyolali	0.1822
3	Kab Rembang	0.3258	21	Kab Pekalongan	0.1687
4	Kab Sukoharjo	0.3253	22	Kab Wonogiri	0.1681
5	Kab Purbalingga	0.3181	23	Kab Wonosari	0.1679
6	Kab Karang Anyar	0.3127	24	Kab Banjarnegara	0.1591
7	Kab Grobogan	0.3035	25	Kab Jepara	0.1486
8	Kab Tegal	0.2831	26	Kab Batang	0.1299
9	Kab Klaten	0.2773	27	Kota Semarang	0.1232
10	Kab Semarang	0.2739	28	Kab Kendal	0.1032
11	Kota Surakarta	0.2678	29	Kab Pemasang	0.0984
12	Kab Kudus	0.2611	30	Kab Temanggung	0.0938
13	Kab Purworejo	0.2596	31	Kota Magelang	0.0912
14	Kab Sragen	0.2438	32	Kab Cilacap	0.0885
15	Kab Pati	0.2421	33	Kab Blora	0.0830
16	Kab Brebes	0.2401	34	Kab Demak	0.0667
17	Kab Kebumen	0.2308	35	Kota Salatiga	0.0415
18	Kota Pekalongan	0.2288			

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 5.3 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang menarik dimana daerah-daerah yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan seperti kabupaten Semarang dikalahkan oleh daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat kekuasaan seperti kabupaten Tegal, Banyumas, dan Rembang. Hal lain yang menarik dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah adalah ternyata daerah penghasil migas seperti kabupaten Cilacap dan Blora jauh tertinggal laju pertumbuhannya dari daerah bukan penghasil migas apabila hasil penjualan migas dan inflasi tidak dimasukkan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti daerah tersebut terlalu mengandalkan penghasilan migas sebagai pendapatan daerah.

#### 4. Jawa Timur

Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur ditunjukkan oleh tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Periode tahun 2001 s.d. 2007 Berdasarkan PDRB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000

No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	No.	Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Sidoarjo	0.4454	20	Kota Surabaya	0.1640
2	Kota Madiun	0.3807	21	Jombang	0.1623
3	Pasuruan	0.3630	22	Kota Probolinggo	0.1607
4	Tuban	0.3542	23	Kediri	0.1454
5	Magetan	0.3461	24	Probolinggo	0.1430
6	Lumajang	0.3392	25	Mojokerto	0.0960
7	Kota Blitar	0.3083	26	Kota Mojokerto	0.0745
8	Banyuwangi	0.2997	27	Kota Pasuruan	0.0683
9	Malang	0.2723	28	Bangkalan	0.0348
10	Jember	0.2671	29	Kota Kediri	0.0329
11	Nganjuk	0.2505	30	Trenggalek	0.0290
12	Ngawi	0.2296	31	Sumenep	(0.0098)
13	Kota Malang	0.2263	32	Gresik	(0.0164)
14	Tulungagung	0.2247	33	Sampang	(0.1637)
15	Blitar	0.2238	34	Pacitan	(0.2096)
16	Bondowoso	0.2237	35	Situbondo	(0.2191)
17	Bojonegoro	0.2150	36	Ponorogo	(0.4389)
18	Lamongan	0.1998	37	Pamekasan	(0.6526)
19	Madiun	0.1867			

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur menempatkan kota Sidoarjo sebagai daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa dan Bali. Sementara itu disisi lain, pada provinsi Jawa Timur juga terdapat daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah di pulau Jawa dan Bali yaitu kabupaten Pamekasan. Data ini menunjukkan

pertumbuhan ekonomi pada provinsi Jawa Timur tidak konvergen (divergen) sebab begitu jauhnya perbedaan antara laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu lebih dari 50% dalam waktu 7 tahun sejak tahun 2001 s.d. 2007. Ini berarti jika kota Sidoarjo setiap tahunnya mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36% maka kabupaten Pamekasan mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,97% setiap tahun. Hal ini sangat ironis mengingat jarak antara kabupaten Pamekasan dan Sidoarjo tidak terlalu jauh.

Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa pembangunan tidak semata-mata hanya berdasar laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga menyangkut masalah pemerataan pembangunan. Hal ini terbukti pada adanya perbedaan yang besar antara daerah yang dulu merupakan pusat kekuasaan seperti DKI Jakarta dengan daerah yang berada di sekitarnya.

## 5.2. Hasil Estimasi Regresi

### 5.2.1. Uji Signifikansi

Penentuan model estimasi OLS yang ditransformasi menjadi model estimasi WLS dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan pengujian. Model estimasi WLS ini dipilih setelah melalui uji signifikansi  $R^2$  terhadap model estimasi OLS yang memberikan hasil nilai  $R^2$  yang tidak signifikan yaitu 18,23%. Nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan adanya kecenderungan regresi memiliki masalah heteroskedastis yang cenderung dialami model estimasi regresi dengan data kerat lintang. Untuk menentukan kepastiannya, kemudian dilakukan uji Glejser terhadap model regresi dengan menggunakan nilai absolut residual. Hasil yang diperoleh adalah dari 10 variabel bebas yang digunakan, ada 6 koefisien variabel bebas yang tidak signifikan berdasar uji t. Hasil uji Glejser ini menunjukkan bahwa hasil regresi dengan model estimasi OLS memiliki masalah heteroskedastisitas.

Sementara itu masalah otokorelasi tidak ditemukan pada persamaan OLS awal. Berdasar uji Breusch-Godfrey terhadap kedua model tersebut diperoleh hasil probabilitas model 1 = 33,56% > 5% (tingkat kesalahan) dan model 2 = 36,28% > 5%. Berdasar hasil uji Breusch-Godfrey tersebut model 1 dan model 2 tidak memiliki masalah otokorelasi.

Tabel 5.5. Hasil Estimasi Regresi Model 1 dan Model 2

Variabel Bebas	Model 1		Model 2	
	Hasil Estimasi	Probabilita	Hasil Estimasi	Probabilita
Konstanta	-37,62257 (9,793556)	0,0002***	-31,40265 (9,754115)	0,0017**
LnY/N <sub>i,2001</sub>	2,513596 (0,561574)	0,0000***	2,217949 (0,561361)	0,0001***
LnPdd <sub>i,2001</sub>	3,910981 (0,887253)	0,0000***	3,397932 (0,891556)	0,0002***
LnRmh <sub>i,2001</sub>	0,085669 (0,032319)	0,0093***	0,082330 (0,031935)	0,0113**
LnY/N <sub>i,2001</sub> •LnPdd <sub>i,2001</sub>	-0,253144 (0,058971)	0,0000***	-0,219171 (0,059215)	0,0003***
LnSek <sub>i,2001</sub>	0,015971 (0,081442)	0,8449	0,078396 (0,077548)	0,3144
LnSimp <sub>i,2001</sub>	-0,079094 (0,046337)	0,0908*	-0,153631 (0,060149)	0,0121**
TFR <sub>i,2001</sub>	-0,047243 (0,010741)	0,0000***	-0,042758 (0,011086)	0,0002***
AHH <sub>i,2001</sub>	-0,026816 (0,018518)	0,1506	-0,025158 (0,018309)	0,1724
LnBHP <sub>i,2001</sub>	0,193338 (0,109250)	0,0797*	0,141868 (0,106674)	0,1865
LnPPD <sub>i,2001</sub>	-0,116197 (0,077741)	0,1380	-0,124147 (0,076732)	0,1087
D			0,300520 (0,160639)	0,0642*
N	115		115	
R <sup>2</sup>	0,576315		0,595410	
Adj R <sup>2</sup>	0,535577		0,552201	
S.E. of Regresion	6,82E+14		5,99E+13	
Sum square resid	4,83E+31		3,69E+29	
F-statistik	14,14656		13,77989	
Probabilita	0,000000		0,000000	

Keterangan:

Angka dalam kurung adalah nilai *standard error* koefisien regresi

\*\*\* Menyatakan bahwa koefisien regresi secara statistik signifikan pada tingkat kesalahan 1%

\*\* Signifikan pada tingkat kesalahan 5%

\* Signifikan pada tingkat kesalahan 10%

Untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas, model estimasi OLS tersebut ditransformasi menjadi model estimasi WLS dengan cara membobot seluruh variabel pada model OLS tersebut dengan *sum square residual* (SSR). SSR diketahui merupakan penjumlahan *error* kuadrat dari seluruh variabel bebas yang terdapat pada model. Hasil transformasi model tersebut ditunjukkan oleh tabel 5.5. Hasil analisis regresi pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel-variabel bebas dapat dianggap cukup baik sebab uji R<sup>2</sup> terhadap kedua model

mendapatkan nilai  $R^2$  sebesar 57,63% untuk model 1 dan 59,54% untuk model 2. Mengingat data yang digunakan adalah data kerat lintang maka nilai  $R^2$  sebesar lebih dari 57% pada kedua model memberi arti bahwa variabel terikat laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam regresi. Untuk pengujian koefisien regresi secara menyeluruh, uji F, didapat probabilita  $F\text{-stat} = 0,000000 < \alpha (0,01)$ , artinya secara bersama-sama variabel-variabel bebas dalam model secara signifikan mempengaruhi variabel terikat laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali.

Kemudian, untuk pengujian koefisien secara parsial, uji t, diperoleh hasil 7 variabel bebas pada model 1 dan 6 variabel bebas pada model 2 secara signifikan dan individual mempengaruhi variabel terikat laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota dengan tingkat kesalahan bervariasi 1%, 5%, dan 10%.

## 5.2.2. Uji Asumsi Dasar

### 5.2.2.1. Uji Multikolinieritas

Berdasar hasil uji multikolinieritas terhadap model diketahui bahwa hanya terdapat 2 koefisien korelasi yang cukup signifikan yaitu koefisien korelasi antara variabel bebas tingkat kelahiran anak per keluarga total dengan tingkat angka harapan hidup tahun 2001 yaitu sebesar -0,77 dan antara variabel bebas simpanan penduduk per kapita dengan PDRB per kapita tahun 2001 yaitu sebesar 0,71. Walaupun kedua nilai tersebut cukup signifikan namun belum dapat dianggap relatif tinggi sebab masih dibawah nilai 0,8, sehingga dapat dikatakan kedua model regresi tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas antara variabel-variabel bebas.

### 5.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Kedua model sebelum diestimasi telah ditransformasi dari model estimasi OLS menjadi model estimasi WLS. Transformasi dilakukan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas yang dimiliki oleh kedua model tersebut sebelum transformasi dilakukan. Hasil transformasi pada kedua model menunjukkan adanya peningkatan jumlah variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota dan peningkatan nilai uji  $R^2$  sehingga berdasarkan hal tersebut kedua model dapat dianggap telah bersifat homoskedastis.

### 5.3. Analisis Ekonomi

Regresi yang ditunjukkan oleh tabel 5.5 mengandung variabel terikat laju pertumbuhan ekonomi dan variabel-variabel bebas yang dapat diinterpretasikan sebagai nilai asal dari variabel kondisi/syarat dan variabel-variabel penentu.

Variabel bebas logaritma natural PDRB per kapita tahun 2001 setiap daerah sebagai *initial level of physical capital*. Variabel logaritma natural PDRB per kapita tahun awal juga mencerminkan modal awal dari modal fisik dan sumber daya alam (dan juga tergantung pada usaha dan pengaruh teknologi yang tidak terobservasi). Variabel bebas logaritma natural jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA tahun 2001 di setiap daerah, interaksi logaritma natural PDRB perkapita tahun 2001 dengan logaritma natural jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA tahun 2001 di setiap daerah, tingkat angka harapan hidup tahun 2001 setiap daerah, dan tingkat kelahiran anak per keluarga tahun 2001 setiap daerah sebagai *initial level of human capital*.

Sementara itu variabel bebas logaritma natural rumah penduduk dengan status dimiliki sendiri di setiap daerah, logaritma natural jumlah sekolah negeri (SD, SMP, SMA, & SMK) tahun 2001 di setiap daerah, dan logaritma natural jumlah simpanan per kapita tahun 2001 setiap daerah sebagai faktor kondisi, sedangkan variabel bebas logaritma natural bagi hasil pajak dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah tahun 2001 setiap daerah sebagai *determinant*.

#### 5.3.1. Analisis Konvergensi

Model Neo Klasik memprediksikan suatu koefisien yang negatif pada logaritma natural PDRB per kapita tahun awal yang dimasukkan dalam model yang berbentuk logaritma untuk menunjukkan indikasi terjadinya konvergensi. Koefisien dari logaritma natural PDRB per kapita tahun awal juga menunjukkan tingkat kondisi konvergensi. Jika variabel penjelas lain dianggap konstan, maka ekonomi cenderung untuk mendekati posisi jangka panjangnya pada tingkat yang diindikasikan oleh besaran koefisien.

Koefisien regresi yang diperoleh adalah positif dan signifikan yaitu sebesar 2,514 (s.e. = 0,562) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali tidak konvergen atau divergen dalam



tingkat yang sangat signifikan. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak mendekati alur pertumbuhan keseimbangan namun mempunyai alur pertumbuhan ekonomi masing-masing. Besaran koefisien yang positif dan signifikan juga menunjukkan bahwa setiap 1% perubahan PDRB per kapita akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,51%.

Hal ini berarti jika pemerintah tidak mengubah kebijakan menyangkut desentralisasi fiskal khususnya bagi hasil pajak dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah maka jurang perbedaan laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali akan semakin membesar atau divergensi karena laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah bergantung pada modal awal yang dimiliki daerah tersebut atau logaritma natural PDRB per kapita tahun awal. Jurang perbedaan yang semakin besar juga mencerminkan kegagalan pembangunan (dalam hal ini kegagalan program desentralisasi fiskal) untuk memajukan daerah.

Secara teori, laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di pulau Jawa dan Bali menjadi divergen karena daerah-daerah tidak mampu mengendalikan faktor-faktor yang menentukan penghasilan sehingga daerah yang lebih miskin tidak mampu mengejar ketinggalannya, walaupun kondisi yang ada dari segi teknologi, preferensi, dan institusi tidak jauh berbeda. Hal ini terjadi disebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan yang efisien dan efektif. Disamping itu juga terdapat kelemahan institusi daerah dalam mengatur perpindahan input (melalui perangkat hukum) dan tidak adanya pemberian insentif terhadap input yang masuk ke daerah tertentu.

Divergensi dalam laju pertumbuhan daerah ini sebenarnya telah terlihat pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel (5.1), (5.2), (5.3), dan (5.4). Pada tabel-tabel tersebut terlihat bahwa selisih antara laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tertinggi dengan yang terendah tampak begitu jauh sehingga wajar apabila dikatakan bahwa tidak tampak pengaruh positif desentralisasi fiskal khususnya bagi hasil pajak dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah terhadap daerah-daerah di pulau Jawa dan Bali. Dengan berkaca pada kondisi yang terjadi di pulau Jawa dan Bali maka dapat diperkirakan bagaimana jurang perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara daerah

dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan daerah-daerah lain di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian.

Model 2 menunjukkan koefisien  $\beta = 2,217$ . Artinya divergensi pertumbuhan ekonomi antar daerah kabupaten tidak sebesar divergensi antara daerah kabupaten dengan kota di pulau Jawa dan Bali. Hal ini terjadi karena perbedaan pembangunan infrastruktur dan mata pencaharian penduduk antar daerah kabupaten tidak terlalu mencolok dibandingkan perbedaan daerah kabupaten dengan kota. Hal ini juga menunjukkan pembangunan tampak lebih berhasil di daerah kota.

### 5.3.2. Analisis Bagi Hasil Pajak dan Pengeluaran Pembangunan

Koefisien Bagi Hasil Pajak yang ditunjukkan oleh hasil regresi model 1 pada tabel 5.5 menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yaitu sebesar 0,193 (s.e. = 0,109). Koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan prinsip elastisitas, setiap 1% dana bagi hasil pajak akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,193%. Hal ini juga berarti pajak dapat meningkatkan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali. Namun karena tingkat divergensi terlalu besar maka pengaruh bagi hasil pajak ini menjadi tidak berarti.

Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya peningkatan ketersediaan dana untuk pengeluaran pembangunan atau peningkatan bagian pengeluaran pembangunan. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak baik PBB, BPHTB, dan PPh Orang Pribadi maka dengan sendirinya akan meningkatkan dana yang diterima daerah (dana yang ditransfer) untuk melakukan pembangunan atau memberikan stimulasi terhadap ekonomi dengan cara menyediakan barang publik yang tidak dapat dikelola swasta, seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, listrik, PAM, dan pendidikan (teknologi) yang diwujudkan dalam bentuk sekolah gratis pada sekolah-sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah atau adanya subsidi di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Selain itu, sebab lain mengapa Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi adalah belum efisien dan efektifnya pengumpulan pajak lokal sehingga peningkatan penerimaan dana bagi

hasil pajak yang sedikit saja berpengaruh besar terhadap ketersediaan dana daerah. Belum efisien dan efektifnya pengumpulan pajak lokal disebabkan penyediaan data dan informasi yang kurang baik, kualitas pegawai pajak yang belum tinggi, dan masih banyaknya pembayar pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya (*tax evasion* dan *tax avoidance*) membuat peningkatan penerimaan pajak harus dibayar dengan tingginya biaya pengumpulan pajak yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa pengaruh bagi hasil pajak tidak terlalu signifikan (signifikan pada tingkat kesalahan 10%) sebab pada daerah tertentu (mayoritas daerah kota) penerimaan dana bagi hasilnya lebih besar daripada daerah lainnya (mayoritas daerah kabupaten) sehingga secara otomatis dana pembangunannya lebih besar. Berdasarkan model 2 diketahui bahwa dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten. Dengan kata lain, dana bagi hasil pajak hanya berpengaruh signifikan di daerah kota. Artinya laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi lebih banyak ditopang/dihasilkan oleh produktifitas daerah kota sehingga konvergensi laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali tidak tercapai.

Perbedaan jumlah transfer dana bagi hasil pajak yang diterima daerah-daerah tersebut terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Tidak optimalnya tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak karena data kependudukan yang kurang baik (terkait PPh OP).
2. Kualitas pegawai pajak yang masih kurang baik dan tingkat remunerasi yang masih rendah.
3. Rendahnya kualitas pendidikan penduduk menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak.
4. Rendahnya penghasilan penduduk yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian di daerah kabupaten.
5. Aturan PBB dan BPHTB yang diterapkan menganut prinsip pengenaan pajak berdasarkan lokasi sehingga terkadang tidak tepat diterapkan pada daerah tertentu sebab adanya disparitas penghasilan yang signifikan pada satu lokasi.

Untuk melihat pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara utuh berarti harus juga melihat dana bagi hasil pajak tersebut disalurkan dalam bentuk pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu dampak bagi hasil pajak terhadap daerah perlu dianalisis dari segi pengeluarannya.

Hasil regresi menunjukkan koefisien regresi pengeluaran pembangunan sebesar  $-0,116$  (s.e. =  $0,078$ ). Koefisien regresi ini menunjukkan nilai negatif dan tidak signifikan. Artinya pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak efisien dan efektif. Pengeluaran pembangunan yang tidak efisien berarti pengeluaran pembangunan yang dilakukan tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dari investasi. Hal ini terjadi disebabkan adanya korupsi pada pengeluaran pemerintah daerah.

Korupsi timbul disebabkan adanya kedekatan pemerintah daerah dengan pengusaha lokal sehingga menimbulkan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi baik melalui tender ataupun penunjukan langsung tanpa adanya pengawasan yang memadai. Selain itu pengeluaran pemerintah daerah tidak mencerminkan nilai investasi yang sebenarnya sebab nilai yang tertera adalah nilai yang dikorupsi oleh pejabat berwenang baik pejabat pemerintah daerah atau DPRD dan/atau pengusaha yang terkait.

Dampaknya adalah stimulasi ekonomi yang diharapkan dari pengeluaran pembangunan tidak tercapai dan yang terjadi justru menimbulkan dampak negatif sebab meningkatkan biaya rutin untuk pemeliharaan. Contohnya, jalan raya yang dibangun tanpa memperhatikan kualitas bahan baku dan aspek ketahanan menyebabkan hanya dalam tempo 2 bulan jalan yang dibangun telah rusak lagi. Kerusakan yang berulang akan menyedot dana pembangunan untuk biaya rutin. Dalam proses pelaksanaan perbaikan tentu dibutuhkan tender untuk menentukan siapa pelaksana proyeknya akibatnya korupsi akan berulang dan mengempiskan dana pembangunan.

Pengeluaran pembangunan yang tidak tepat disebabkan adanya proyek populis dan lobby-lobby tertentu untuk proyek pembangunan yang sebenarnya tidak berguna untuk masyarakat daerah tersebut namun lebih ditunjukkan untuk

kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan. Dana yang mengalir untuk proyek mubazir tersebut akhirnya hanya menggemukkan kantong-kantong pihak-pihak tertentu, sedangkan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal tidak atau kurang signifikan. Contoh : tambal sulam jalan, pembayaran upah pungut PBB, dana pelesir ke luar negeri, dan lain-lain.

Selain itu, tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah daerah juga disebabkan masalah *free rider* terkait dengan *income redistribution*, *tax avoidance* dan *tax evasion*. Siapa dan berapa yang membayar pajak dan siapa dan berapa yang menikmati manfaat seringkali tidak sama, sehingga dampak pembangunan sering lebih menguntungkan pihak yang tidak membayar pajak (koruptor tidak bayar pajak), sedangkan pihak yang membayar pajak terkadang hanya mendapat manfaat yang kecil jika dikaitkan dengan usaha dan/atau pekerjaannya. Dampak lebih jauh adalah konvergensi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa berapapun besar dana bagi hasil pajak yang berhasil dikumpulkan/diterima tidak akan berpengaruh banyak terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah bila pengelolaannya tidak benar-benar ditujukan untuk kepentingan pembangunan baik di daerah kabupaten maupun kota.

### 5.3.3. Analisis Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Konvergensi Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertama, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA tahun 2001. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi ini adalah positif dan signifikan yaitu sebesar 3,911 (s.e. = 0,887), artinya setiap 1% kenaikan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan lanjutan setelah SMA akan menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,911%. Hal ini berarti peningkatan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan D1, D3, S1, S2 dan S3 berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut atau secara khusus berpengaruh terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut wajar terjadi sebab berdasarkan fakta yang ada, penduduk dengan golongan penghasilan tinggi adalah penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi pula. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk berarti daerah tersebut juga semakin mudah untuk menyerap teknologi

sebagaimana dinyatakan dalam teori pertumbuhan Neoklasik bahwa teknologi merupakan faktor penyebab perubahan laju pertumbuhan ekonomi dalam alur pertumbuhan keseimbangannya dan bukan hanya perubahan level saja sebagaimana pengaruh simpanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teknologi yang digunakan pada daerah-daerah dalam satu negara cenderung sama sehingga peningkatan kualitas penduduk secara merata dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah secara keseluruhan (konvergensi).

Pada variabel bebas ini, dana bagi hasil pajak secara tidak langsung juga meningkatkan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA, namun sayangnya peningkatan ini hanya dinikmati oleh penduduk di daerah kota. Sebagai akibatnya konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali tidak tercapai.

Kedua, keterkaitan logaritma natural PDRB per kapita tahun 2001 dengan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan selepas SMA tahun 2001. Koefisien regresi variabel bebas ini berdasarkan hasil regresi adalah negatif dan signifikan sebesar  $-0,253$  (s.e. =  $0,059$ ). Artinya gabungan dua variabel bebas ini mampu mendorong peningkatan konvergensi/penurunan divergensi sebab perubahan besaran dari koefisien divergensi mengalami penurunan dari sebelumnya  $2,514$  menjadi  $2,261$ . Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dampak positif pendidikan terhadap kemampuan ekonomi adalah untuk menyerap teknologi baru yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun karena tingkat divergensi terlalu besar maka peningkatan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi akibat pendidikan menjadi tidak berguna.

Ketiga, tingkat kelahiran anak per keluarga pada tahun 2001. Koefisien regresi variabel bebas ini menunjukkan nilai yang negatif dan signifikan yaitu sebesar  $-0,047$  (s.e. =  $0,010$ ). Nilai ini menunjukkan tingkat kelahiran anak per keluarga berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebab setiap 1% peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,047\%$  atau dapat juga berarti tingkat kelahiran anak per keluarga menyebabkan divergensi laju pertumbuhan ekonomi.

Hal ini terjadi disebabkan modal finansial (fisik) yang dimiliki penduduk berkurang untuk tujuan biaya pemeliharaan dan perawatan, pendidikan, dan lain-

lain bagi calon tenaga kerja baru (anak) dan bukan ditujukan untuk peningkatan investasi. Jumlah penduduk yang menjadi besar sebagai imbas dari penambahan jumlah penduduk juga akan menyebabkan beban yang harus ditanggung tenaga kerja produktif menjadi lebih besar.

Keempat, tingkat angka harapan hidup tahun 2001. Koefisien regresi variabel bebas ini menunjukkan nilai yang negatif dan tidak signifikan yaitu sebesar  $-0,026$  (s.e. =  $0,019$ ). Nilai tersebut menunjukkan peningkatan angka harapan hidup bagi penduduk Indonesia tidak berpengaruh terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan penduduk di pulau Jawa dan Bali tidak terlalu tinggi sehingga rentang usia produktif tidak bertambah walaupun usia harapan hidup bertambah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk tersebut dapat diketahui dari rendahnya proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan lanjutan setelah SMA.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan di negara maju. Di negara maju tingkat angka harapan hidup memberikan pengaruh positif sebab tingkat pendidikan penduduk tinggi. Dampak dari tingkat pendidikan penduduk yang tinggi adalah bertambahnya umur produktif penduduk sehingga umur produktif penduduk negara maju lebih panjang dibandingkan dengan umur produktif penduduk Indonesia.

Kelima, jumlah rumah penduduk dengan status milik sendiri. Koefisien regresi variabel ini menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yaitu sebesar  $0,086$  (s.e. =  $0,032$ ). Artinya kepemilikan rumah berperan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebab dengan memiliki rumah sendiri berarti dana yang tersedia dari penghasilan pribadi penduduk yang dapat digunakan untuk investasi atau disimpan dapat lebih besar sebab tidak dipotong untuk biaya sewa jika penduduk tersebut tidak memiliki rumah sendiri. Dengan kata lain dengan bertambahnya jumlah rumah penduduk dengan status milik sendiri maka modal finansial penduduk lebih besar dan dapat meningkatkan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tersedianya dana produktif pada masing-masing individu akan meningkatkan akumulasi kapital. Akumulasi/peningkatan kapital sama saja dengan peningkatan PDRB per kapita. Secara aktual dana lebih yang dimiliki oleh

penduduk dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kemampuan penduduk itu sendiri dan/atau penambahan modal usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilannya. Sayangnya berdasar model 2 diketahui bahwa jumlah rumah dengan status milik sendiri lebih banyak berada di daerah kota sehingga terjadi sedikit ketimpangan modal finansial penduduk daerah kabupaten dengan daerah kota.

Keenam, jumlah sekolah negeri yang ada pada tahun 2001. Koefisien regresi untuk variabel ini menunjukkan nilai yang positif dan tidak signifikan yaitu sebesar 0,016 (s.e. = 0,081) yang berarti jumlah sekolah tidak berpengaruh terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Variabel ini seharusnya positif dan signifikan namun mengingat data sekolah pada penelitian ini merupakan data jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA di pulau Jawa dan Bali sehingga tidak begitu menentukan kualitas tingkat pendidikan sebab lulusan SD, SMP, dan SMA belum tentu melanjutkan kuliah yang menjadi syarat untuk mendapatkan gaji/penghasilan yang tinggi.

Disamping itu juga banyaknya jumlah sekolah belum tentu mencerminkan jumlah murid yang mengikuti pendidikan sebab pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan karena adanya hambatan-hambatan tertentu. Hal lain yang menyebabkan jumlah sekolah tidak berpengaruh terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi adalah banyak terdapat murid yang bersekolah di daerah A misalnya namun kemudian bekerja di daerah B sehingga murid tersebut tidak memberikan manfaat terhadap daerah A.

Terakhir, simpanan per kapita. Koefisien regresi variabel ini sebagaimana terlihat pada tabel 5.5 menunjukkan nilai yang negatif dan signifikan yaitu sebesar -0,079 (s.e. = 0,046) yang berarti setiap 1% peningkatan jumlah simpanan per kapita akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,079% atau dengan kata lain akan menyebabkan divergensi laju pertumbuhan ekonomi. Nilai negatif tersebut terjadi disebabkan peningkatan jumlah simpanan akan mengurangi akumulasi kapital/modal penduduk di daerah miskin sebab secara umum simpanan yang terdapat di daerah yang kurang maju/miskin tidak besar dan lebih banyak digunakan untuk investasi pada daerah yang maju (berdasar model 2).



Hal ini terjadi disebabkan bank sebagai tempat penyimpanan memiliki orientasi laba sehingga bank hanya mau berinvestasi pada daerah yang dianggap akan memberikan keuntungan dan menghindari kerugian yang mungkin timbul jika berinvestasi pada daerah yang miskin. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan banyak bank yang tidak berani menginvestasikan sebagian besar dananya untuk kredit masyarakat dan lebih mencari aman dengan menempatkan dananya pada SBI, Obligasi Pemerintah, dll. Jika bank berani memberikan kredit biasanya kepada debitur yang sudah dikenal (*hunting in the zoo*) sehingga investasi riil tidak berkembang. Penempatan sebagian besar dana pada instrumen keuangan juga memberatkan keuangan negara karena pembayaran SBI, obligasi pemerintah, dll tersebut menggunakan uang penerimaan pajak sehingga alokasi dana untuk transfer bagi hasil pajak dapat berkurang.

Untuk dummy, konstanta antara daerah kota dengan kabupaten menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan sebesar 0,3. Hal ini menunjukkan posisi awal antara daerah kota dan kabupaten hampir sama atau dengan kata lain antara daerah kabupaten dan kota tidak memiliki perbedaan kondisi awal yang besar yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang (dalam konteks konvergensi) antara daerah kabupaten dengan kota.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

1. Hasil estimasi dengan menggunakan metode estimasi WLS menunjukkan 7 dari 10 variabel bebas yang digunakan sebagai acuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Hanya 3 variabel bebas yang tidak berpengaruh signifikan yaitu pengeluaran pembangunan pemerintah daerah setiap daerah kabupaten dan kota tahun 2001, jumlah sekolah negeri yang ada di setiap daerah tahun 2001, dan tingkat angka harapan hidup setiap daerah tahun 2001.
2. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali tidak menunjukkan kecenderungan konvergensi namun divergensi. Hal ini berarti kegagalan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya transfer dana bagi hasil pajak, sebagai alat untuk meningkatkan kemajuan daerah. Kegagalan ini utamanya disebabkan oleh pengeluaran pembangunan yang tidak efisien dan tidak tepat.
3. Dana bagi hasil pajak berpengaruh positif dan cukup signifikan terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah sebab dana bagi hasil pajak menambah dana untuk pengeluaran pembangunan. Namun sayangnya pengaruh bagi hasil pajak tidak terlalu signifikan sebab besaran dana yang diterima setiap daerah berbeda tergantung hasil pengumpulan pajak daerah itu sendiri. Daerah yang kaya tentu menerima dana bagi hasil pajak yang lebih besar daripada daerah miskin. Pada penelitian ini diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh daerah kota artinya dana bagi hasil pajak efektif meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah kota namun gagal di daerah kabupaten. Kegagalan tersebut menyebabkan divergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Faktor-faktor lain yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setelah SMA dan jumlah rumah penduduk dengan status milik

sendiri. Hal ini berarti kedua variabel bebas tersebut merupakan faktor utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah dan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya karena tingkat divergensi terlalu besar di pulau Jawa dan Bali menyebabkan pengaruh positif dua variabel bebas ini menjadi tidak berarti.

5. Sementara itu faktor yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah simpanan per kapita tahun 2001 dan tingkat kelahiran anak per keluarga tahun 2001. Hal ini berarti kedua variabel bebas ini merupakan penghambat laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah dan menyebabkan divergensi laju pertumbuhan ekonomi. Divergensi yang terjadi akibat dua variabel bebas ini terlihat nyata pada perbedaan kondisi antara daerah kota dengan kabupaten.

#### 6.2. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melakukan penelitian *σ convergence* yang berkaitan dengan studi data *time series* pada periode tahun 2001 – 2007 karena keterbatasan waktu dan sulitnya mencari data yang sama pada daerah kabupaten dan kota yang berbeda. *σ convergence* ini berguna untuk mengetahui perubahan kesenjangan pendapatan pada daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali.

#### 6.3. Saran

Berdasarkan hasil studi ini, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Optimalisasi pengumpulan pajak di masing-masing daerah dengan melakukan tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak yang disertai perbaikan dan/atau mengubah sistem informasi data kependudukan nasional agar ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak dapat lebih berhasil.
2. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai pajak di tiap daerah yang disertai dengan perbaikan remunerasi.
3. Pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan harus diperketat untuk menghindari adanya pengeluaran pembangunan yang tidak efisien dan tepat (korupsi, program populis, dan lobby-lobby).

4. Alokasi dana untuk pendidikan dan perbaikan infrastruktur daerah diperbesar.
5. Insentif usaha pada daerah miskin diperbesar sehingga dana dapat mengalir ke daerah-daerah tersebut.
6. Penyederhanaan sistim administrasi perpajakan.
7. Penyempurnaan aturan pajak yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB berdasar prinsip *equity* dan *efficiency*.



### DAFTAR PUSTAKA

1. Asteriou, D., & Hall, Stephen. G. (2007). *Applied Econometrics :A modern approach* (2<sup>nd</sup> ed.) New York : Pallgrave macmillan.
2. Barro, R.J. (1998). *Determinant of economic growth : A cross-country empirical study*. Massachusetts : Massachusetts Institute of Technology, Cambrige.
3. Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic growth*. New York : McGraw-Hill.
4. Deni Daruri (2009, January 21). APBN 2009 dalam desain IMF. *Media Indonesia*, hal. 12.
5. Drs. Sarwoko, M. Si. (2005). *Dasar-dasar ekonometrika*. Yogyakarta : Andi.
6. Gabungkan daerah pemekaran gagal. (2009, February 16). *Media Indonesia*, hal. 2.
7. Gujarati, D.N. (1995). *Basic econometrics*. (3<sup>rd</sup> ed.) New York : McGraw-Hill.
8. Korupsi tahan pertumbuhan ekonomi. (2009, February 12). *Media Indonesia*, hal. 13.
9. Hall, R. Varian. (1993). *Intermediate Microeconomics : A modern approach* (3<sup>rd</sup> ed.) New York : W. W. Norton & Company.
10. Hall, R. Varian. (1992). *Microeconomics analysis* (3<sup>rd</sup> ed.) New York : W. W. Norton & Company.
11. Nicholson, Walter. (2005). *Microeconomics Theory : Basic principles and extensions* (9<sup>th</sup> ed.) South Western : Thompson.
12. Oates, Wallace E. (1999). *An essay on fiscal federalism*. *Journal of Economic Literature*, Vol.37, No.3, 1120-1149.
13. Oates, Wallace E. (1985). *Searching for Leviathan: An empirical study*. *American Economic Review*, Vol.75, No.4, 748-757.
14. Pemekaran wilayah hanya munculkan pemborosan. (2009, February 18). *Media Indonesia*, hal. 2.
15. Romer, David. (2006). *Advanced macroeconomics* (3<sup>rd</sup> ed.). New York : McGraw-Hill.

16. Rosen, Harvey S. (2001). *Public finance* (6<sup>th</sup> ed.). New York : McGraw-Hill.
17. Stiglitz, Joseph. E. (1999). *Economics of the public sector* (3<sup>rd</sup> ed.). New York : W. W. Norton & Company.
18. Uten Sutendy (2009, February 4). Mekanisme korupsi di birokrasi. *Media Indonesia*, hal. 18.
19. Wing Wahyu Winarno (2007). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan Eviews*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.



**Universitas Indonesia**

**Lampiran 1. Hasil Uji Model 1**

Dependent Variable: PDRBGROWTH

Method: Least Squares

Date: 06/17/09 Time: 23:18

Sample: 1 115

Included observations: 115

Weighting series: RESID

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-37.62257	9.793556	-3.841564	0.0002
LNPDRB01	2.513596	0.561574	4.475987	0.0000
LNEDUCATION	3.910981	0.887253	4.407965	0.0000
LNHOUSE	0.085669	0.032319	2.650732	0.0093
LNPDRB01*LNEDUCATION	-0.253144	0.058971	-4.292670	0.0000
LNSCHOOL	0.015971	0.081442	0.196098	0.8449
LNSAVKAPITA	-0.079094	0.046337	-1.706936	0.0908
LNTAXTRANSFER	0.193338	0.109250	1.769683	0.0797
LNDEVSPEND	-0.116197	0.077741	-1.494675	0.1380
FERTILITY	-0.047243	0.010741	-4.398471	0.0000
LIFEEXPECT	-0.026816	0.018518	-1.448113	0.1506

**Weighted Statistics**

R-squared	0.576315	Mean dependent var	-2.69E+13
Adjusted R-squared	0.535577	S.D. dependent var	8.24E+13
S.E. of regression	5.60E+13	Akaike info criterion	66.24012
Sum squared resid	3.26E+29	Schwarz criterion	66.50268
Log likelihood	-3797.807	F-statistic	14.14656
Durbin-Watson stat	1.142120	Prob(F-statistic)	0.000000

**Unweighted Statistics**

R-squared	-2.477063	Mean dependent var	0.173658
Adjusted R-squared	-2.811396	S.D. dependent var	0.146907
S.E. of regression	0.286804	Sum squared resid	8.554663
Durbin-Watson stat	1.442686		

## Lampiran 2. Hasil Uji Model 2

Dependent Variable: PDRBGROWTH

Method: Least Squares

Date: 06/17/09 Time: 23:20

Sample: 1 115

Included observations: 115

Weighting series: RESID

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-31.40265	9.754115	-3.219426	0.0017
LNPDRB01	2.217949	0.561361	3.951020	0.0001
LNEDUCATION	3.397932	0.891556	3.811238	0.0002
LNHOUSE	0.082330	0.031935	2.578092	0.0113
LNPDRB01*LNEDUCATION	-0.219171	0.059215	-3.701266	0.0003
LNSCHOOL	0.078396	0.077548	1.010931	0.3144
LNSAVKAPITA	-0.153631	0.060149	-2.554171	0.0121
LNTAXTRANSFER	0.141868	0.106674	1.329916	0.1865
LNDEVSPEND	-0.124147	0.076732	-1.617932	0.1087
FERTILITY	-0.042758	0.011086	-3.857132	0.0002
LIFEEXPECT	-0.025158	0.018309	-1.374079	0.1724
D1	0.300520	0.160639	1.870777	0.0642

### Weighted Statistics

R-squared	0.595410	Mean dependent var	-3.03E+13
Adjusted R-squared	0.552201	S.D. dependent var	9.29E+13
S.E. of regression	6.22E+13	Akaike info criterion	66.45821
Sum squared resid	3.98E+29	Schwarz criterion	66.74464
Log likelihood	-3809.347	F-statistic	13.77989
Durbin-Watson stat	1.212801	Prob(F-statistic)	0.000000

### Unweighted Statistics

R-squared	-2.357615	Mean dependent var	0.173658
Adjusted R-squared	-2.716195	S.D. dependent var	0.146907
S.E. of regression	0.283199	Sum squared resid	8.260783
Durbin-Watson stat	1.385570		